# Justisia

Jurnal Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan





# DEFORMASI MAKNA RADIKAL

## Dari Kemunculannya Hingga Kini

ISSN : 1410-1785

EDISI 51 Tahun 2019

JUSTISIA
UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN

**IJIN TERBIT**
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
No. 01/B-1 WS/III/1993
ISSN 1410-1785
Jurnal Edisi 48
Th. XXXIII /2017



**Alamat Redaksi:**
Gedung Student Center
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Lantai 1
Jl. Raya Prof. Dr. Hamka KM. 2
Ngaliyan Semarang 50185,
Telp. (024) 7601291
Fax. (024) 7610128
Email: justisia.pers@gmail.com
Contact Person
085747155948 (Jaedin)
085643774645 (Fadli)

# DAFTAR ISI





Redaksi menerima naskah 7-8 halaman, spasi 1, diutamakan dalam bentuk *rtf. Naskah disertai foto dan bagi yang dimuat akan mendapatkan imbalah sepantasnya. Redaksi berhak mengedit naskah tanpa mengubah subtansinya. Masing-masing tulisan merupakan tanggungjawab penuh penulis.

# SALAM REDAKSI

Mendengar kata radikalisme, kalian pasti akan teringat dengan terjadinya peristiwa 11 September di Amerika. Dan mulai saat itu juga, ramai-ramai dunia menabuh genderang perang terhadap apa yang disebut dengan radikalisme. Di Indonesia sendiri seruan itu juga menggema saat Orde Militeristik Harto mengecap siapa pun dan kelompok mana saja yang menolak asas tunggal Pancasila. Radikalisme, dengan demikian, sering dikaitkan-kaitkan dengan gerakan terorisme atau disematkan kepada golongan paham keagamaan ekstrim, yang kontras dengan golongan paham keagamaan moderat pada umumnya. Bahkan, dewasa ini, golongan yang tak sepakat dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah, distigma sebagai golongan radikal. Begitu katanya.

Sementara jika kita mau menengok sejarah, sebenarnya kata radikal muncul bersamaan dengan semangat mengubah kondisi yang timpang serta mengiringi perjuangan hak, kesetaraan, keadilan dan pembebasan. Tiap gerakan yang membawa semangat perubahan secara "mendasar" sampai ke "akar", adalah gerakan radikal. Kata radikal, dalam sejarahnya, selalu merujuk pada gerakan yang mengusung perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada sama sekali konotasi negatif terhadap apa yang disebut radikalisme.

Tapi anehnya, di era Kiwari seperti sekarang, orang mendengar kata radikal seketika merujuk pada gerakan teroris, pemberontak, pengancam ideologi, sesat dan lain-lain. Bagi orang nasionalis kata radikal itu menjadi momok menakutkan sehingga layak dimusuhi. Padahal, semangat "radikalisme" pernah menjadi salah satu katalisator kemerdekaan republik ini.

Oleh karenanya, kami redaktur jurnal Justisia tertatik untuk mengupas lebih dalam mengapa kata radikal ini mengalami deformasi makna. Kata yang secara leksikal mengandung makna positif tiba-tiba berubah menjadi kata terlarang yang mengancam agama, nusa dan bangsa. Tepat rasanya analisis semiotika pragmatis milik Charles Sanders Pierce (1914-1839) digunakan buat melihat fenomena deformasi makna ini. Semiotik sendiri adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia (H Hoed, Benny 15 :2014). Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus diberi makna. Sebab, pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna dari berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dan manusia dapat disebut juga sebagai homo signans.

Selain itu, dalam salah satu tulisan

di dalam jurnal ini ada juga yang membahas tentang sejarah gerakan yang dikatakan radikal yang pernah ada di muka bumi. Mulai dari Revolusi Perancis yang radikal itu, Inggris, merintang ke nusantara pada awal abad ke19- yang ditandai dengan bangkitnya gerakan-gerakan seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, ISDV dan lain sebagainya.

Singkat kata, kami selaku redaksi jurnal Justisia mengucapkan selamat membaca sambil memaknai tanda! :')

***Redaksi***





# Radikalisme: Gerakan Positif Menuju Indonesia Merdeka



**M. Ainul Yaqin**

Lembaga Studi Justisia (eLSA) Periode 2018-2019 dan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

**Abstrak**

*Pada awalnya gerakan radikal sebelum era kemerdekaan sudah muncul jauh ketika penjajahan itu sendiri hadir di tengah masyarakat. Hanya saja gerakan pada waktu itu hanyalah dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang berusaha menyelamatkan agar tidak terluka dan mendapat rasa aman dari penjajah. Pada awal 1912, pergerakan itupun lahir dengan dipelopori oleh Sarekat Islam. Serangkaian aksi yang dilakukan semenjak rakyat "melek" dengan ketertindasan penguasa kolonial itulah yang dipahami sebagai kata radikal yang berkembang pada saat itu.*

**Keyword:** Radikal, Gerakan Massa, dan Ketertindasan

Melihat gerakan radikalisme sebelum era kemerdekaan berarti kembali melihat runtutan sejarah terhadap masyarakat Jawa karena gerakan radikalisme akan mulai terdeteksi pada masyarakat Jawa ketika adanya penjajahan dari pihak asing. Secara periodik masyarakat Jawa dibagi menjadi lima periode, yakni periode pra sejarah, periode Hindu dan Buddha, periode Islam, periode kolonial, dan periode modern[1].

Dalam masa pra sejarah, orang

1. Sri Wintala Achmad, Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa, Yogyakarta: Araska, 2017, hlm. 11.

jawa menurut para arkeolog dengan didukung penemuan fosil Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens membuktikan bahwa DNA-nya tidak jauh dengan DNA pada orang-orang jawa sekarang. Pun adanya ditemukan fosil-fosil di lembah Bengawan Solo yang menunjukkan bahwa orang jawa yang dikenal dengan kaum Lemuria atau Legena pernah tinggal di sana. Namun, sejak Gunung Kelud meletus pada 7000 SM, sebagian besar dari mereka punah.

Pada masa ini belum terdeteksi adanya gerakan radikalisme yang muncul. Pun ketika pada masa periode Hindu dan Buddha, orang-orang Jawa belum bisa dikatakan radikal jika hanya terpengaruh ajaran untuk memeluk agama Hindu maupun Buddha atau bahkan agama Islam karena mereka awalnya menganut paham animisme dan dinamisme.

Namun ketika pada masa kolonial, yakni di era kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, banyak orang Jawa diwajibkan untuk mengikuti kerja rodi guna membangun benteng atau jalan raya dengan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) serta dikirim ke Suriname untuk Bekerja di perkebunan. Tak jauh berbeda ketika masuknya penjajahan Jepang di mana banyak orang Jawa dijadikan sebagai pekerja *Romusha*. Dari sini kemudian akan terdeteksi mulai berkembangnya gerakan-gerakan radikal untuk melawan penjajahan dalam berbagai bentuk[2].

Saat kekuatan Barat sampai ke negara Indonesia, kondisi masyarakat



Indonesia pada saat itu sungguh sangat terbelakang. Keterbelakangan ini tentunya disebabkan oleh adanya corak produksi feodal, di mana rakyat hidup dengan cara bercocok tanam, akan tetapi hasil dari tanah kebanyakan harus diserahkan pada tuan-tuan feodal, bangsawan, dan raja-raja.

Pada saat Indonesia berada dalam era feodal tersebut, Barat telah mengalami berbagai macam perubahan. Dimulai dengan bangkitnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana puncak itu semua adalah revolusi para pemilik modal dan industrialis yang menghancurkan tatanan feodalisme, lalu munculnya industrialisasi yang diikat oleh tatanan kapitalisme di mana modal sebagai tenaga produktif utama yang berusaha meningkatkan kekuatannya untuk mencari keuntungan.

Dalam mencari keuntungan ini, industri membuat produk-produk yang terus diperbarui, mengembangkan kreativitas dengan mengolah dan membuat produk ataupun teknologi yang lebih baru, di mana pada saat yang sama mereka harus mencari sumber-sumber bahan mentah baru serta menekan upah buruh.

Tindakan semacam ini pun telah

2. Ibid, hlm. 13-12.

mengakibatkan ketidakpuasan karena kemiskinan dan kelaparan kemudian memunculkan perlawanan di mana-mana. Berbagai ide dan cara untuk melawan muncul di Barat saat kapitalisme tumbuh pesat, sehingga isme-isme dan konsep pemikiran sosial-politik yang tumbuh itu nantinya juga akan berkembang di masyarakat dan juga akan dibawa ke arah dunia ketiga, suatu tananan dunia yang mungkin saja saat itu belum bernama[3].

Untuk mengatasi berbagai perlawanan buruh dan meningkatkan pendapatannya agar dapat memberikan upah buruh yang juga menuntut kenaikan gaji, pemilik modal dan angkatan perang serta gerombolan ilmuwannya juga mencari sumber keuntungan ke wilayah-wilayah lainnya, salah satunya juga sampai di wilayah Nusantara yang kelak akan bernama Indonesia tersebut.

Indonesia merupakan wilayah kolonial Belanda dan dapat dikatakan sebagai pusat industri Belanda. Sumber kekayaan berasal dari negeri ini tetapi pada pusat-pusat strategisnya berada di negeri Belanda, seperti pada pusat keuangan serta perdagangannya. Karena keterbelakangan feodalis inilah pada saat Belanda masuk untuk menjadi penjajah, Indonesia tidak memiliki faktor-faktor ekonomi, sosial, ataupun intelektual buat melepaskan diri dari perbudakan ekonomi dan politik di dalam lingkungan imperialisme penjajah[4].

Kedatangan penjajah lebih banyak membawa kerugian daripada



keuntungan yang didapat, terkhusus masyarakat Jawa. Selain eksploitasi budaya, alam, ada banyak air mata dan darah yang bercucuran. Kemiskinan di tanah yang subur membuat rakyat bergejolak. Masyarakat yang memiliki jiwa atriotic akan melawan bersama para bangsawan dan ulama. Tapi bagi masyarakat yang tidak memiliki jiwa patriot akan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri.

Ada banyak masyarakat bawah yang melawan dan berusaha mendapatkan haknya kembali yang telah dirampas oleh pemerintah kolonial dengan cara menjadi bandit atau penjahat. Mereka kebanyakan bekerja secara kelompok meskipun ada yang bekerja secara individu. Adapun target mereka yakni gerobak-gerobak pengangkut hasil bumi, orang-orang kaya yang memihak kepada penjajah, pengelola perkebunan, bahkan penjajah (Belanda) sendiri pun menjadi incaran mereka.

Kebanyakan profesi yang mereka lakukan ini memiliki kesaktian ilmu hitam seperti kebal senjata, menghilang, atau ilmu sirep yang mampu membuat orang terlelap meskipun rumahnya sedang dijarah. Inilah tunas-tunas gerakan radikal yang mulai tumbuh

3. Nurani Soyomukti, Soekarno dan Nasakom, Yogyakarta: Garasi, 2016, hlm. 45-44.
4. Ibid, hlm. 46.

di kalangan masyarakat dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah[5].

**Lahirnya Radikalisme yang Terorganisir**

Pada awal 1912, pergerakan itupun lahir dengan dipelopori oleh Sarekat Islam. Pada mulanya perkumpulan itu bukan bernama Sarekat Islam, namun Rekso Roemekso yang didirikan oleh Haji Samanhoedi bersama beberapa saudara, teman, dan para pengikutnya.

Rekso Roemekso merupakan perkumpulan yang fungsinya hanya sebatas tolong menolong untuk menghadapi para kecu yang membuat daerah Lawean tidak aman, kemungkinan menurut Takashi adalah karena adanya pencurian kain batik yang dijemur di halaman tempat pembuatan batik. Sehingga organisasi itupun seperti organisasi ronda yang bertugas mengawasi keamanan daerah[6].

Nama Rekso Roemekso kemudian berubah menjadi Sarekat Islam karena adanya serangkaian perkelahian jalanan antara orang-orang Jawa dari Rekso Roemekso dengan organisasi yang serupa bernama Kong Sing dari orang-orang Tionghoa pada bulan-bulan terakhir 1911 dan awal 1912. Perkelahian ini kemudian mengundang polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap status hukum Rekso Roemekso. Hasil penyelidikan itu kemudian mengubah Rekso Roemekso menjadi Sarekat Islam.

Pada masa itu, status hukum bagi sebuah perkumpulan menjadi sangat penting karena jika sebuah perkumpulan tanpa adanya status hukum maka suatu waktu perkumpulan itu bisa dibubarkan dengan perintah residen. Namun kenyataannya bahwa orang-orang Rekso Roemekso terdiri atas pedagang batik dan pegawai rendahan Kesunanan sehingga bagi mereka terlalu sulit untuk mengerti serta menyusun anggaran dasar dan mengikuti seluruh proses hukum sehingga kepatihan dan residen mau mengakui "eksistensi" mereka.

Untunglah pendiri Rekso Roemekso, Samanhoedi memiliki teman dekat bernama Djojomargoso yang menjadi pegawai Kepatihan. Djojomargoso kemudian meminta bantuan kepada Marthodarsono yang pernah menjadi redaktur Medan Prijaji dan memahami masalah hukum yang kini tengah dialami Rekso Roemekso.




Taktik Marthodarsono dalam menghadapi penyelidikan polisi cukup unik. Ia mencoba menghindar dari masalah-masalah hukum dengan mengatakan bahwa Rekso Roemekso adalah cabang dari Sarekat Dagang Islamijah (SDI) Bogor. Ketika polisi memintanya untuk menyerahkan anggaran dasar organisasi, ia meminta bantuan

5. Mada Zidan dan Bonaventura C. Genta, Kisah Tanah Jawa, Jakarta, 2019, hlm. 138-140
6. Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1926-1912, terj. Hilmar Farid, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 55.

kepada Tirtoadisoerjo, seorang aktivis SDI untuk menyusun anggaran dasar dan menyerahkannya kepada kepala onderafdeling Lawean. Ia kemudian mengumumkan pembentukan cabang SDI Bogor di Surakarta dalam surat kabar. Semenjak itu Rekso Remekso resmi berganti nama menjadi Sarekat Islam, walaupun orang-orang Solo menyebutnya sebagai Sarekat Dagang Islam[7].

Sarekat Islam bisa dikatakan sebagai organisasi yang menjadi tempat bersemainya berbagai macam ideologi. Bahkan, ideologi dan partai politik yang tumbuh hingga saat inipun lahir dari pertumbuhan dan dinamika organisasi Islam. Nasionalisme, Islam, dan Komunisme (NASAKOM) juga tumbuh dari organisasi ini. Dari cikal bakal yang satu akhirnya melahirkan berbagai aktivis dan intelektual yang mematangkan ideologinya pada masing-masing individu.

Dalam perkembangannya, SI kemudian menjadi organisasi radikal yang tidak lepas dari pengaruh marxisme yang menularkan cara pikir progresif di kalangan tokoh-tokohnya. Bahkan melalui berkah SI jualah yang membuat rakyat jelata, terutama kaum buruh mulai memahami arti pentingnya organisasi sebagai alat untuk melawan[8].

Organisasi dan pengetahuan yang awalnya menjadi milik kalangan bangsawan (priyayi) seperti Budi Oetomo, kini berubah menjadi milik rakyat. Situasi yang baru juga diwarnai dengan tumbuhnya serikat-serikat buruh. Dari sinilah bentuk perlawanan secara radikal terhadap kolonialisme mulai masuk kepada sektor rakyat yang paling tertindas. Bernuansa radikal karena tidak lagi bersandar pada gerakan elitis yang tak berbasis pada massa meluas.

Kaum buruh yang masih sulit mendapatkan pendidikan pun mulai mengenal istilah-istilah baru untuk menjelaskan posisi mereka di tengah-tengah ketertindasan yang menimpa mereka. Lebih jauh, kaum buruh juga mulai mengenal bacaan-bacaan yang diorganisasika oleh serikat.

Maka dalam konteks ini, rakyat Hindia Belanda bisa dikatakan mulai ada kemajuan dari sisi kebudayaan. Kalau pada masa sebelumnya hanya pada kalangan tertentu, khususnya anak-anak priyayi yang mengenal bacaan, maka kaum buruh dan rakyat jelata juga mulai terbangunkan oleh budaya literer. Serikat-serikat buruh seperti yang diorganisasi oleh SI memasifkan budaya literer baik melalui terbitan-terbitan berupa koran, maupun dengan buku-buku yang berusaha menyadarkan kaum buruh.

Bacaan-bacaan tersebut kemudian bagi pemerintah kolonial disebut sebagai "bacaan liar", karena dianggap berbeda dengan bacaan-bacaan yang diorganisasi secara resmi oleh pemerintah kolonial. Bacaan itupun diolah dengan gaya bahasa yang mudah dipahami rakyat dan bertujuan untuk melontarkan kata-kata yang sesuai dengan tuntutan dan cara pandang rakyat.

7. Ibid, hlm. 57-55.
8. Nurani Soyomukti, Soekarno dan...hlm. 55.

Gerakan rakyat, dengan pendidikan politik serta dibangunnya "Sekolah Rakyat" oleh kaum progresif juga mempercepat kebangkitan Indonesia sebagai bangsa. Hal itu untuk membuat agar tidak hanya para turunan priyayi saja yang mendapatkan pendidikan, tetapi juga bagi rakyat kecil. Sekolah-sekolah ini tentu berguna untuk menyosialisasikan pemikiran baru dari Barat, karena pada waktu itu Indonesia masih berada di masa kegelapan, di mana rakyat harus tunduk dan patuh pada para raja dan bangsawan yang dianggapnya sebagai orang sehingga kepada merekalah rakyat harus mengabdikan hidupnya.

Artinya, pendidikan politik rakyat pada saat itu mulai terbangun. Pendidikan politik yang diorganisasikan oleh aktivis kerakyatan seperti Semaun adalah yang paling berperan dalam membangkitkan kebangkitan akan kebangsaan yang didefinisikan bukan berdasarkan agama dan suku, tetapi berdasarkan semangat anti penindasan dan keadilan. Hanya dengan landasan semacam itulah nasionalisme menemukan akar-akarnya yang cukup kuat bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Kondisi ekonomi sejak tahun 1921 mengalami kemerosotan. Banyak orang yang menganggur dan para buruh pun banyak yang di-PHK atau ada yang masih kerja namun gajinya tidak dinaik-naikkan, tidak sesuai dengan kenaikan harga barang-barang pada masa itu.

Tuntutan rakyat untuk perubahan nasib pun tak terbendung. Tetapi setiap perlawanan yang radikal pada era itu



akan ditindas oleh penguasa kolonial. Pemogokan massal di pegadaian pada tahun 1922, maupun pemogokan buruh kereta api pada tahun 1923, jelas-jelas mendapatkan reaksi yang berlebihan dari penguasa, yang waktu itu berada di bawah gubernur Jenderal Dirk Fork yang terkenal kejam[9].

Pada waktu itu, hanya ada dua organisasi yang bisa dipilih rakyat, terutama kaum buruh dan rakyat miskin: yang pertama adalah SI pimpinan Cokroaminoto, Suryopratono, Agus Salim, dan lain-lain, yang sifat gerakannya hati-hati dengan pemerintah agar tetap bisa bertahan dengan konsesi-konsesi yang diberikan oleh penguasa; dan satunya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berkonfrotasi dengan pemerintah.

Politik konfrontasi PKI berujung pada pemberontakan November 1926 di Banten. Pemberontakan ini kemudian gagal dan mereka ditumpas, sebagian aktivisnya dibuang ke Digul. Kegagalan PKI juga menyebabkan gerakan rakyat berhati-hati untuk melakukan perlawanan. Maka dengan ini berakhirlah generasi pertama zaman pergerakan nasional.

Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat kebangkitan gerakan nasional

9. Ibid, hlm. 58-56.

melawan penjajah di mana Bung Karno tampil menjadi tokoh yang paling berpengaruh pada saat itu dalam melakukan perlawanan. Kematangan politik dan ideologi Bung Karno mulai terartikulasikan dan dapat ditangkap oleh massa rakyat untuk menggantikan keberadaan PKI dan para pejuang radikal lainnya yang telah dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial. PKI sendiri merupakan anak dari pertentangan dalam Sarekat Islam, terutama antara apa yang disebut sebagai "SI Putih" dengan "SI Merah"[10].

Tentunya, basis material ekonomi, kekuasaan, dan penindasannya tidak berubah. Pada saat itu Bung Karno muda menyampaikan gagasannya menentang penjajahan, nusantara masih terus mengalami kemiskinan dan pemiskinan akibat penjajahan kolonial.

Soekarno lahir pada tanggal 6 Jun 1901, pada saat fajar menyingsing. Karena itu pulalah oleh Cindy Adams, disebut sebagai Putra Sang Fajar. Seakan Soekarno memang merupakan anak alam. Bahkan ada pertanda lain ketika ia lahir, yakni Gunung Kelud yang berada tepat di belakang rumahnya, meletus. Orang Jawa berpikiran bahwa gunung itu menyambut kelahiran Soekarno[11].

Tak dapat dipungkiri jika dilihat dari silsilahnya, Bung Karno memiliki darah bangsawan. Ia adalah anak seorang perempuan kelahiran Bali dari Kasta Brahmana. Ibunya, Idayu, berasal dari keluarga raja. Raja Singaraja yang terakhir adalah paman Ibu Bung Karno.



Bapak Soekarno, Raden Sukemi Sosrodihardjo, juga berasal dari keturunan bangsawan Jawa, yakni masih keturunan Sultan Kediri. Keluarga Raden Sukemi tak kalah patriotiknya karena nenek dari nenek Sukemi yang statusnya di bawah seorang putri kerajaan juga merupakan para pejuang perempuan melawan penjajah.

Dalam perjuangannya, Bung Karno dan kalangan radikal melihat bahwa aksi-aksi ekonomis harus diarahkan pada aksi-aksi yang lebih maju dan diseret ke arah yang lebih tinggi. Maksudnya adalah aksi-aksi massa bukanlah bertujuan untuk memperjuangkan hal-hal yang bersifat sementara, semisal pemogokan dan aksi-aksi massa dari buruh untuk meminta kenaikan upah. Akan tetapi tindakan-tindakan tersebut seharusnya lahir untuk menolak ketidakadilan yang harus dilanjutkan dan diarahkan pada perjuangan merebut kekuasaan.

Dalam 'pikiran rakyat', 1933, Bung Karno mengkritik kalangan reformis yang hanya berjuang dan memimpin perjuangan massa untuk hal-hal yang bersifat sesaat. Kaum reformis menurutnya adalah seperti: *"yang mereka kerjakan sehari-hari hanya apa yang bisa dicapai hari ini saja,*

10. Baskara T. Wardaya, Bung Karno Menggugat, Yogyakarta: Galangpress, 2006, hlm. 66.
11. Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2014, hlm. 22-21.

*seperti turunnya pajak atau tambahan sekolahan"*[12].

Bukan berarti Bung Karno tidak melihat bahwa capaian-capaian kecil itu tidak penting. Memperjuangkan tuntutan untuk mendesak rakyat sangatlah penting, namun hal itu harus dibarengi dengan adanya tuntutan yang paling maju dan perlawanan pun harus tetap berlangsung secara radikal hingga Indonesia merdeka dan kapitalisme-imperialisme mati.

Dalam "Mentjacapai Indonesia Merdeka" (1933), Soekarno pernah berujar, bahwa *"kita harus menggerakkan rakyat jelata di dalam suatu pergerakan radikal yang bergelombang seperti banjir, menjelmakan pergerakan massa yang tadinya onbewust dan hanya raba-raba itu menjadi suatu pergerakan massa yang bewust dan radikal, yakni massa aksi yang sadar akan jalan dan maksud-maksudnya"*.

Dari pernyataannya tersebut jelas bahwa Soekarno semakin radikal. Seruan-seruan kerasnya dalam surat kabar maupun dalam pidato-pidatonya yang dianggap 'berbahaya' oleh penguasa akan sangat mengganggu stabilitas masyarakat kolonial. Bung Karno masuk dalam daftar hitam polisi kolonial yang harus diciduk bila ia semakin berani. Bahkan bila ada yang membaca koran 'Fikiran Rakyat' dan memakai peci seperti Bung Karno, para pengikutnya diancam oleh penguasa dengan sanksi akan dijebloskan ke dalam penjara[13].

**Radikalisme Adalah Perjuangan**

Rangkaian peristiwa-peristiwa masa silam yang terjadi di tanah Ibu Pertiwi merupakan gerakan-gerakan rakyat pribumi dalam merespon hadirnya kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat penjajah.

Sehingga pemaknaan kata "radikal" sebelum 17 Agustus 1945 merupakan suatu pergerakan ke arah kemerdekaan yang dicita-citakan setelah sekian lama kolonialisme-imperialisme hidup subur di tengah rakyat pribumi. Serangkaian aksi yang dilakukan semenjak rakyat "melek" dengan ketertindasan penguasa kolonial itulah yang dipahami sebagai kata radikal yang berkembang pada saat itu.

Terlebih ketika Soekarno berpidato dengan menghimbau warga pribumi agar digerakkan dalam gerakan radikal seperti banjir. Ini menujukkan bahwa pada masa itu kata "radikal" merupakan spirit persatuan perjuangan bersama dalam menolak penjajahan.

Memang pada awalnya gerakan radikal sebelum era kemerdekaan sudah muncul jauh ketika penjajahan itu sendiri hadir di tengah masyarakat. Hanya saja gerakan pada waktu itu hanyalah dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang berusaha menyelamatkan agar tidak terluka dan mendapat rasa aman dari penjajah. Bahkan ada saja yang sampai mempelajari ilmu hitam agar bisa selamat dari pemerintah kolonial.

Tetapi gerakan radikal yang kemudian menjadi besar dan ter-

12. Ir Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, hlm. 224.
13. Nurani Soyomukti, Soekarno dan...., hlm.95.

organisir adalah gerakan yang diilhami oleh Sarekat Islam yang awalnya bernama Rekso Roemekso. Dari pergesekan-pergesakan dalam tubuh Sarekat Islam inilah muncul beragam partai yang salah satunya adalah PKI yang melegenda itu.

Jadi kalau sekarang radikalisme dimaknai sebagai gerakan-gerakan ekstrim yang sebenarnya tujuannya untuk menuntut perubahan, maka pada zaman sebelum kemerdekaan radikalisme justru mengarah kepada tujuan agar bebas dari penjajahan. []





## DAFTAR PUSTAKA


Achmad, Sri Wintala. 2017. *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska.

Soyomukti, Nurani. 2016. *Soekarno dan Nasakom*. Yogyakarta: Garasi.

Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa -1912 1926, terj. Hilmar Farid, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

T. Wardaya, Baskara. 2006. *Bung Karno Menggugat*, Yogyakarta: Galangpress.

Adams, Cindy. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bung Karno.

D. Genta, Bonaventura dan Mada Zidan. 2019. *Kisah Tanah Jawa*, Jakarta: GagasMedia.






# Prahara Revolusi: Melampaui Ekstremitas Peradaban Prancis Hingga Transformasi Masyarakat Dalam Tatanan Revolusi Industri



**Nisrina Khairunnisa**

Redaktur Jurnal Justisia Periode 2019-2020 dan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

**Abstrak**

*Pada abad ke 18-17 terjadi revolusi agung sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh dunia. Tak dapat dipungkiri keberadaannya, Inggris, Prancis, dan Amerika merupakan pionir penting bagi peradaban barat. Secara khusus, Era Revolusi Prancis menjadi penegasan pada kemerdekaan, kesetaraan serta penghapusan sistem feodal. Sebagian kaum radikal adalah mereka yang tergabung dalam golongan revolusioner. Tatanan pemerintahan yang tergambar dalam rezim lama Prancis berpegang teguh pada hak istimewa dan despotisme. Sedangkan sebagian kaum revolusioner yang sudah geram terhadap tirani memberikan gebrakan-gebrakan baru, dan berjanji akan mewujudkan cita-cita Pencerahan. Pembebasan diri manusia, kemerdekaan, keadilan sosial, serta persamaan hak asasi manusia yang merupakan cita-cita Pencerahan yang secara tegas akan mengakhiri abad-abad penindasan dan kesengsaraan.*

**Keyword**: Revolusi, Radikal, dan Rezim Lama

**Pembagian Strata Sosial**

*"Mari berharap semoga permainan berakhir dengan baik."* Sebuah ungkapan yang terdapat pada kartun

politis, menggambarkan wanita kelas pekerja yang sedang menggendong wakil rakyat dengan perasaan puas karena memiliki hak istimewa.

Terjadinya revolusi di Prancis tak luput dari kejamnya rezim lama saat itu. Masyarakat Prancis pada abad kedelapan terbagi dalam tiga kasta. Kasta pertama terdiri dari kaum imam, kasta kedua kaum bangsawan, dan kasta terakhir merupakan masyarakat lainnya yang notabene tidak mempunyai hak-hak istimewa dan identik dengan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.

Prancis saat itu memang jauh dari kesejahteraan, kedamaian, serta ketentraman. Kaum Imam (seseorang yang dianggap religius) yang seharusnya memberikan ketenangan rohani, turut eksis menjadi seseorang yang harus dipatuhi serta ditakuti masyarakatnya. Kekuasaan dan hak-hak istimewa gereja Katolik Prancis seperti mendirikan Negara di dalam Negara. Berabad-abad gereja bertugas mendata kelahiran, perkawinan, dan mencatat data kematian. Menarik pajak masyarakat dan lucunya pihak gereja tidak ikut serta membayar pajak. Namun, gereja membagikan hadiah gratis kepada Negara dengan jumlah yang senantiasa lebih kecil daripada pajak yang dikeluarkan masyarakat.

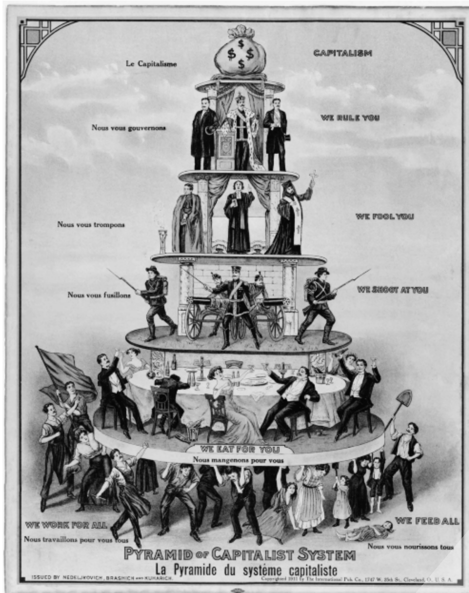
Pada kasta pertama, kaum pendeta turut serta mencerminkan pembagian strata sosial di Prancis. Mereka terdiri dari pendeta papan atas yang gaya hidupnya sejajar dengan kaum bangsawan, dan pendeta wilayah yang notabene keturunan dari orang biasa. Pendeta yang berasal dari keturunan biasa inilah yang marah terhadap pendeta papan atas. Hingga pada 1789, ketika revolusi mulai dihentakkan banyak pendeta yang bersimpati dengan gerakan perubahan dari kasta ketiga.

Sama halnya dengan kasta pertama, kasta kedua ini dipegang oleh kaum bangsawan yang mempunyai hak-hak istimewa. Mereka menduduki posisi tertinggi dalam tatanan Negara, gereja, dan militer. Mereka dibebaskan dari pajak, mengrumpulkan iuran dari kaum petani, dan memiliki lahan antara seperempat dan sepertiga[1].

Kaum borjuis, petani, dan para buruh perkotaan menduduki kasta ketiga. Jika ditelaah lebih dalam lagi, sebenarnya kaum borjuis ini memiliki kekayaan dan profesi yang cukup dihormati di masyarakat, seperti dokter, pengacara, cendekiawan, saudagar kaya dan lain sebagainya. Namun mereka tidak dapat menyeimbangi kaum bangsawan maupun kaum Imam dikarenakan kekurangan wibawa sosial.

Acap kali terpengaruh oleh *elite* bangsawan, kaum borjuis ikut-ikutan berusaha untuk menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja, mereka justeru ingin meningkatkan strata sosial, sehingga pada 1789, kaum borjuis mampu memiliki tanah kurang lebih sebesar 20 %. Akses pembelian jabatan masih dirasa sulit, karena biaya yang begitu mahal, hanya sebagian kaum borjuis saja yang mampu membeli jabatan. Terbatasnya jumlah jabatan

1. Marvin Perry, terjemahan buku Western Civilization, A Brief History Second Edition (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), hal.6.




baru, kaum borjuis mulai frustasi akan hal ini, sistem sosial lebih diagungkan daripada *skill.*

Terbukalah pikiran mereka akan sistem sosial yang makin membabi buta. Menjelang 1789, kaum borjuis menginginkan semua jabatan di gereja, kemiliteran, dan Negara harus terbuka lebar bagi orang-orang yang memiliki banyak bakat tanpa melihat status sosialnya. Selain itu, mereka berusaha keras agar suatu konstitusi membatasi keabsolutan raja dan menciptakan kebebasan berpendapat, toleransi agama, dan perbaikan administrasi dari perilaku-perilaku boros yang sering dikaitkan oleh kasta pertama dan kedua.

Meningkatnya angka kelahiran antara 1789-1715, populasi yang bertambah sekitar 18 juta menjadi 26 juta menyebabkan pembagian lahan yang semakin sempit kepada para ahli waris. Sistem pajak yang tidak adil dan korup oleh kaum bedebah menjadi beban berat kaum petani. Pemerintahan Louis XIV menjaga kekuasaannya dan memungut pajak dari kaum petani untuk membiayai peperangan, kekejaman itu berlangsung sepanjang abad kedelapan belas. *Double taxes* yang dikeluarkan para kaum tani tidak hanya diberikan pada kerajaan, namun iuran-iuran gereja juga dituntut untuk memenuhi hak-hak istimewa kaum bangsawan.

Pada abad pertengahan meskipun mayoritas perbudakan hampir punah, para tuan tanah menganggap kaum tani seperti halnya budak. Kaum tani adalah mereka yang menggarap, membayar iuran, dan masih harus menggiling padi-padian di penggilingan. Sejatinya para tuan tanah bertekad untuk mempertahankan hak-hak istimewanya demi melanggengkan simbol otoritas dan martabat sosial.

**Kepailitan Administrasi Negara**

Kerancuan finansial yang terasa makin lunglai memberikan peluang bagi pelopor Pencerahan untuk melancarkan misi sebuah Revolusi. Pembelian jabatan yang begitu fantastis, mengorientasikan bagaimana cara mengumpulkan uang yang banyak. Begitu nahas rezim lama tersebut, dipegang oleh pejabat-pejabat yang tidak cakap dan hanya mengandalkan material daripada bakat.

Menjelang 1787, pemerintah belum melunasi hutang yang disebabkan perang-perang pada masa pemerintahan Louis XIV. Terlebih pemberian hadiah-hadiah dan uang pensiun yang diberikan raja kepada kaum bangsawan acap kali mengeringkan perbendaharaan Negara. Sifat boros, arogan dan rakus

terhadap hak-hak istimewa mereka.

Tahun-tahun terakhir rezim lama, pemerintah tidak dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk menutupi pengeluaran yang begitu besar. Sistem pajak yang tidak relevan dan sangat tidak adil memberikan dampak yang sangat negatif terhadap Negara yang dijuluki Kota Mode ini.

Pada saat Prancis diambang kebangkrutan, para menteri raja memberi ultimatum kepada kaum bangsawan dan pihak-pihak gereja agar memberikan sebagian potongan pajak mereka. Namun, ultimatum tersebut tak menuai hasil, mereka tetap saja berpendirian kuat agar hak-hak istimewa tidak diambil alih.

Badan Perwakilan Nasional (*estates general*) bersidang pada Mei 1789, dan akan mendominasi *estates general*. Timbullah pemberontakan antara kaum bangsawan dengan kekuasaan kerajaan, akibatnya, pemberontakan tersebut membuka pintu lebar-lebar kepada kaum revolusioner yang akan menghancurkan Rezim lama beserta hak-hak istimewa oleh golongan Imam dan bangsawan.

## Eksistensi Pelopor Pencerahan dan Revolusi Amerika

"Filsafat abad kedelapan belas mengajarkan kepada orang Prancis untuk merasa bahwa kondisi mereka sangat buruk, atau bagaimanapun juga, tidak adil dan tidak masuk akal dan membuat mereka tidak sudi terhadap sikap pasrah yang sabar menghadapi berbagai kesulitannya yang sudah lama menjadi ciri para leluhurnya… Propaganda "Para Pelopor Pencerahan" mungkin bertanggung jawab lebih daripada faktor lainnya bagi pemenuhan syarat persiapan Revolusi Prancis, yakni ketidakpuasan terhadap keadaan yang sedang dihadapi"[2]. Sebuah ungkapan Henri Peyre yang mampu menciptakan psikologi revolusioner.

Pelopor Pencerahan merupakan sebuah ungkapan ketika revolusi berlangsung. Para pemimpinnya menggunakan ungkapan tersebut untuk mencanangkan gerakan pembaharuan mereka. Peran daripada Revolusi Amerika memberikan pengadopsian ideologi liberal bagi para pendukung Pencerahan. Selain itu, revolusi Amerika juga membantu jalannya revolusi Prancis hingga Deklarasi kemerdekaan, Deklarasi Hak-Hak Manusia, dan Hak Warga Negara terwujud.

## Sebuah Pemberontakan

Krisis keuangan merupakan awal terjadinya pemberontakan golongan masyarakat, tentunya pada kasta ketiga (borjuis). Negara kebingungan akan hilangnya otonomi yang disebabkan oleh masyarakat sipil dan kerap menimbulkan perkara-perkara sosial.

Karena tidak adanya sumber-sumber dana, maka *Calonne* merancang perubahan-perubahan besar. Hal ini guna memperbaiki keadaan fiskal kerajaan. Ia memberikan usul kepada Louis XVI untuk mengajukan rencana perubahan dan meminta persetujuan kepada para dewan. Tampaknya, harapan *Calonne* besar kemungkinan

2. Henry Oyre, "Pengaruh Ide-ide Abad Kedelapan Belas Terhadap Revolusi Prancis", Journal of the History of Ideas, 73:(1949) 10.

akan ditolak oleh para dewan, karena mayoritas mereka merupakan orang-orang yang memiliki hak istimewa.

Pada abad XVIII kaum bangsawan Prancis menuntut akan perubahan-perubahan tersebut. Akhirnya mereka menjatuhkan *Calonne* dan menolak penggantinya. Atas nama kemerdekaan, dalam 1787 dan 1788 kaum-kaum borjuis di seluruh penjuru kota bersatu, menggerakkan mekanisme revolusioner di sekeliling kaum-kaum bangsawan. Peningkatan gerakan perubahan semakin drastis, lalu mereka mengatasnamakan persamaan.

Sejak akhir 1789, kaum bangsawan berkecimpung dalam ide-ide baru, hingga meresapi dan memahaminya terjadilah perpecahan. Pendek kata antara bangsa yang sudah berpikiran maju menyerang Rezim lama. Mereka berhasil mengadakan pertemuan-pertemuan Dewan Perwakilan Golongan dalam bentuk-bentuk yang baru.

Berbicara mengenai sebuah revolusi borjuis, baru-baru ini sejumlah sejarawan menentang perspektif jika kaum borjuis memandang dirinya sedang memenuhi cita-cita para pelopor Pencerahan dan menyelamatkan umat manusia. Sebelum 1789 kaum bangsawan dan borjuis tidak menampakkan diri sebagai kelompok yang bertentangan satu sama lain dalam konteks sistem kasta. Justeru terlihat sama dan tidak ada perbedaan yang mendetail. Banyak kaum bangsawan terlibat dalam perusahaan bisnis, pertambangan, tekstil, dan perdagangan luar negeri, yang jika diamati lebih dalam termasuk dalam bidang kaum borjuis.

Dalam hal ini, para revisionis memberikan sebuah argumen bahwa kaum borjuis mengatasnamakan cita-cita pencerahan bukan semata-mata ingin mencapai sebuah kemerdekaan, ataupun persamaan sosial, melainkan mereka sangat ingin mendapatkan status bangsawan. Lalu, bagaimana nasib kasta ketiga yang lainnya, terutama kaum petani dan kaum-kaum yang bukan petani?

Sejatinya kaum bangsawan tidak semua rakus terhadap hak-hak istimewa mereka. Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa sejumlah kaum bangsawan sudah ada yang mencoba perubahan baru dan meninggalkan Rezim lama demi persatuan bangsa. Sejumlah bangsawan, seperti halnya kaum borjuis, juga menganut nilai-nilai liberal para pendukung Pencerahan dan bertekad untuk melenyapkan despotisme monarkis dan membenahi tatanan Negara yang dulunya begitu bobrok.

William Doyle menyimpulkan, bahwa "kaum bangsawan adalah elit terbuka, bukan kelas turun-temurun yang terpisah. Sekarang juga tidak mungkin untuk mempertahankan bahwa elit ini semakin kurang terbuka sewaktu abad kedelapan belas terus berlanjut hanya karena suatu reaksi aristokratis yang eksklusif"[3].

**Tahun yang Cerah**

Tak disangka semuanya begitu

3. William Doyle, Origins of the French Revolution (London:Oxford University Press, 1987), hlm.9.

cepat, hanya dalam kurun waktu lima bulan saja semua kejadian serba mendadak. Saling terkait satu sama lain, seolah-olah perjalanan waktupun tiba-tiba berubah. Inilah salah satu makna dari "Revolusi".

Pertempuran telah usai, Revolusi menang dan Rezim Lama kalah. Peristiwa 4 Agustus merupakan masa dimana deklarasi dicetuskan, lalu berkelanjutan dengan peristiwa Oktober yang ditandai dengan pindahnya raja ke Paris tampaknya membuat suasana semakin damai dan tenteram.

Pemikiran abad 18 sudah terbuka dan sadar akan rezim yang tak berperi kemanusiaan. Rezim lama pada tahun kemenangan ini terlihat tidak mempersiapkan diri, sehingga mereka harus menerima kekalahan ini. Pemikiran aristokratis dan borjuis sebenarnya tidak menggunakan taktik revolusioner, melainkan hanya terbatas pada suatu strategi reformis, tentu saja yang diinginkan adalah menggulingkan Rezim Lama[4].

Pada abad 18 Prancis memainkan peran serta dalam peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan, pertumbuhan penduduk, maupun dalam hal ekonomi. Akan tetapi perkembangan yang khas Prancis adalah adanya gerakan-gerakan filsafat yang menggugat bentuk-bentuk keyakinan tradisional atas nama akal budi[5].

Dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, sebenarnya semua negara Eropa turut berperan dalam pergerakan besar ini yang dimulai sekitar pertengahan abad ke17-. Tetapi seorang Prancis yang bernama Descartes menjadi salah satu peletak dasar ilmu pengetahuan modern. Atau sebutlah Pascal, Clairat, d'Alembert, Lagrange memberi andil bagi kemajuan di bidang matematika. Hal ini menunjukkan bahwa para ilmuwan Prancis sering berperan di latar terdepan[6].

Adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ini tentu tidak lepas dari minat penguasa yang berwenang maupun dari khalayak umum. Ini terbukti pada tahun 1665, Colbert mendirikan Akademi Ilmu Pengetahuan (*Academie des sciences*) dan majalah Jurnal Cendekiawan (*Journal des savants*). Tahun 1737-1736, Louis XV mengirim misi ilmiah ke Peru dan Laporan untuk membandingkan ukuran dua derajat garis busur. Kemudian tahun 1785, Louis XVI menugaskan La Perouse meneruskan penjelajahan di Samudera Pasifik. Di samping itu, adanya khalayak awam yang membuat karangan ilmiah populer seperti karya Fontelle berjudul Perbincangan tentang Kemajemukan Dunia (*Entretiens sur la pluralite des mondes*) yang meraih sukses besar pada tahun 1686. Voltaire memperkenalkan karya-karya Newton kepada masyarakat Prancis, Diderot tertarik mendalami ilmu fisiologi dan ilmu kimia, dan sebagainya. Antusiasme yang luar biasa ini merupakan bukti betapa besarnya minat khalayak terhadap ilmu pengetahuan[7].

4. Francois Furet dan Denis Richet, terj. Lembaga Indonesia Prancis, Revolusi Prancis, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1989, hlm. 115.
5. Jean Carpentier dan Francois Lebrun, terj. Tonny Pasuhuk, dkk, Sejarah Prancis dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad Ke20-, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017, hlm. 239.
6. Ibid. hlm. 239.



Hanya saja dalam bidang terknologi, Prancis tidak memiliki cukup andil besar karena nyaris bidang ini dimonopoli oleh Inggris. Memang betul Denis Papin itu yang pertama kali membuat mesin yang menggunakan dorongan tenaga uap air sekitar tahun 1690, dan Cugnot pada tahun 1769 mencoba menggunakan mesin yang serupa untuk menarik peralatan artileri. Tetapi James Waat asal Skotlandia lah yang betul-betul layak disebut sebagai pencipta mesin uap pada tahun 1780 karena penyempurnaannya. Demikian juga Inggris lah yang pertama kali memperkenalkan tanaman pakan dalam siklus budidaya pertanian[8].

Dalam pertumbuhan penduduk, Prancis bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang melonjak karena dari 21,5 juta penduduk pada tahun 1700 menjadi 28 juta tahun 1790. Tetapi betapa pun besarnya pertumbuhan itu, ternyata masih rendah jika dibandingkan negara-negara Eropa lain. Selain itu, laju pertumbuhan tersebut nyatanya tidak menimbulkan revolusi demografis karena struktur kependudukan yang ada nyaris tidak berubah.

Kemudian para filosof Prancis pada masa itu sama-sama melontarkan kritik sistematis terhadap masyarakat sezamannya. Dalam hal agama misal, hampir semuanya menerima keberadaan Tuhan, tetapi menolak para Gereja dan dogma. Gagasan deisme oleh Reousseau juga disertai penolakan yang sama terhadap para Gereja yang ada, tetapi bermuara pada rasa keagamaan yang lebih mendalam dan lebih tulus[9].

**Tentang Revolusi Industri**

Dalam pengertian sempit, revolusi industri diartikan sebagai perubahan besar yang berlangsung tiba-tiba dalam hal cara memproduksi barang-barang dagangan dan keperluan hidup yang terjadi di Inggris antara tahun 1760 dan 1850. Perubahan ini, dipengaruhi dengan adanya pemanfaatan inovasi teknologi (terutama pemanfaatan mesin uap) dan investasi kapital yang terus meningkat, melahirkan tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal melimpahnya bahan dan barang dagangan.

Menurut George Norman Clark (1953), konsep revolusi industri telah menjadi kosakata dalam histografi kontemporer. Istilah ini sebenarnya telah digunakan lebih dahulu di Prancis (*industrielle revolution*) dan Jerman yang belum pernah digunakan di Inggris, tetapi kemudian dipakai luas oleh Inggris. Bahkan para

7. Ibid. hlm. 240.
8. Ibid, hlm. 240.
9. Ibid, hlm. 245.

sejarawan menurut R.M. Hartwell tidak memiliki kesepakatan tentang definisi revolusi industri dalam hal kecepatan pertumbuhan produksi, atau perubahan struktur ekonomi, atau bahkan perubahan secara teknis. Bagaimanapun, hubungan erat antara kata *revollution* dengan *industry* muncul jauh lebih dahulu di Prancis, di mana kata *revollution* untuk pertama kali memperoleh arti modern sebagai "tiba-tiba, perubahan radikal"[10].

## Revolusi Terusik dari Asalnya

Juli, 1790 di atas reruntuhan Rezim Lama kini saatnya bagi Dewan untuk membangun rumah masa depan bagi golongan ketiga, atau disebut dengan kaum revolusioner. Rumah yang terbuka lebar bagi setiap orang dan siap menampung berbagai macam bakat, tidak memandang status sosial , konstitusi tertulis, dan pemerintahan parlementer. Rupanya sejalan dengan rasa puas terhadap kerja yang tuntas, tatanan sosial yang baik, dan persediaan pangan bagi rakyat kembali normal. Namun tetap saja, masa revolusi kedepannya tidak dapat diprediksi.

Dengan sigapnya, revolusi bergerak ke arah yang tidak diantisipasi dan tidak diinginkan oleh para pembaharu. Sebuah kontrarevolusi yang tidak dapat didamaikan, dipimpin oleh para bangsawan dan anggota gereja yang terasing. Lahir sebuah gerakan yang mengancam Revolusi, memaksa, serta mengintimidasi kepemimpinan revolusioner, hingga jatuh dalam situasi dan kondisi yang ekstrim; Radikal.



Keluarnya revolusi dari jalurnya, disebabkan oleh banyak hal. Kesulitan dalam bidang finansial, keagamaan, kontra revolusi, aksi-aksi tuntutan *Sans Cullotes*, yang mana semua itu didominasi karena krisis keuangan. Persoalan finansial yang paling utama mengenai mengangsur hutang-hutang Rezim Lama, dan memperkirakan pembayaran hutang-hutang yang secara tidak bijaksana dibebankan pada diri sendiri. Persediaan uang juga termasuk salah satu masalah dari krisis keuangan. Kini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara tradisional untuk memperoleh uang, seperti jual beli jabatan yang dalam rezim baru telah dihapus.

Hutang-hutang Rezim lama yang dapat ditaksir sebesar lima miliar tak dapat dipungkiri oleh kaum revolusioner borjuis. Politik mereka justru menambah hutang-hutang baru: melanjutkan pembayaran pajak feodal lama. Peran gereja-gereja kini telah beralih haluan oleh Negara. Pada hal pengeluaran berjalan dengan normal dan tidak begitu melonjak: pengeluaran tahun 1789 sebesar 731 juta, tahun 1791 meningkat menjadi 822 juta, namun itu sudah termasuk pembayaran uang muka jaminan hutang jangka

10. Hansiswany Kamarga dan Julius Siboro, Isu-Isu Kontroversial dalam Sejarah Barat, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2012, hlm. 117.

pendek yang ditinggalkan Necker[11].

Pecahnya para pastor gereja dicurigai karena ada sebagian pastor yang mengarah pada aristokratisme dan kontra-revolusi. Mereka telah mengkhianati sumpah konstitusi. Sepertiga anggota Gereja di Dewan setuju untuk bersumpah pada Januari 1791, namun hanya sebagian uskup yang bersumpah dengan sepenuh hati, lainnya mereka mengkhianati sumpah tersebut.

***Sans- Culottes***

Radikalisme revolusi didorong juga oleh ketidakpuasan kaum *Sans Culottes* (buruh, dan pedagang kecil). Mereka melancarkan aksi-aksinya karena adanya pengkhianatan dalam cita-cita pencerahan yang sesungguhnya. Meskipun mereka telah ikut dalam memainkan peran revolusi, khususnya dalam pertempuran Bastille dan Hari-hari Oktober, mereka seperti dianaktirikan oleh kaum borjuis.

Kali pertama, gerakan rakyat yang otonom menjadi kuat, menuntut keadaan ekonomi dalam usaha meningkatkan upah, dan mewujudkan eksistensi demokrasi politik yang sesungguhnya. Mereka juga menying-gung perpajakan, kebencian terhadap pemonopoli, dan kecurigaan terhadap kaum borjuis yang nampaknya bersekongkol dengan musuh revolusi. Hal itulah yang membuat mereka marah dan bangkit.

Dinamakan *Sans Culottes* karena saat melancarkan aksinya, mereka menggunakan celana panjang, dan mereka tidak menyukai celana selutut dan terbuat dari sutera yang dikenakan kaum bangsawan dan borjuis yang kaya. Secara politis mereka lebih menyukai republik demokratik yang memberikan suara kepada orang biasa.

Dapat digambarkan seperti anak tangga, yang terjadi antara tahun 1789 kaum borjuis menuntut kesamaan dengan kaum bangsawan, mereka menginginkan kedudukan yang terhormat. Setelah berhasil mewujudkan kesamaan haknya, menjelang tahun 1792, *San Culottes* balik menuntut kesamaan dengan kaum borjuis. Mereka sudah mencurigai bahwa kaum borjuis telah bekerjasama dengan musuh revolusi. *San Culottes* menginginkan pembaruan-pembaruan politis yang akan memberi suara kepada kaum miskin di dalam pemerintahan, dan pembaruan sosial yang akan memperbaiki nasib mereka.

**Sebuah Makna**

Revolusi Prancis merupakan salah satu tonggak dalam pembentukan peradaban Barat modern. Mereka yang merasa tertindas, ketidakadilan yang semakin menghujam, kemiskinan meraja lela, dan menuntut akan persamaan hak, membuat suatu barisan tersendiri guna mewujudkan cita-cita bangsa yang indah dan cerah; Kaum Revolusioner.

Mengahancurkan masyarakat hierarkis, melenyapkan Rezim Lama, mendorong kepentingan-kepentingan kaum borjuis, dan mempercepat pertumbuhan Negara yang modern merupakan sebuah azzam yang telah melekat pada jiwa mereka.

11. Ibid, hlm. 156

Sepanjang abad kesembilan belas, Prancis yang baru dengan tatanan Negara yang juga baik telah mematahkan aristokrasi, memusnahkan sistem feodal dan hak-hak istimewa mereka. Kaum bangsawan menjadi orang biasa yang tak lagi dapat sembarangan dalam memegang jabatan khusus di dalam negeri. Negara akan diperintah baik dan amanah oleh kaum manapun, termasuk borjuis. Tidak lagi memandang kekayaan dan keturunan dalam menentukan komposisi elit penguasa yang baru.

Tidak ada lagi negara dalam negara, Raja yang meng-klaim dirinya sebagai Tuhan dengan kekuasaan yang absolut telah nihil adanya. Pada konsep yang baru, negara adalah milik rakyat secara utuh, mereka mempunyai hak dan kewajiban masing-masing serta diatur oleh undang-undang yang tidak ada kata "diskriminasi", semua sama rata.

Pemikiran liberal pencerahan menemukan ekspresi praktisnya dalam pembaruan-pembaruan revolusi. Kebebasan beragama, berbicara, kebebasan pers, dan tegaknya keadilan bersatu padu dalam irama negeri. Revolusi sangat menentang penyalahgunaan yang dilakukan Rezim Lama. Cita-cita liberal tersebut di seluruh Benua Eropa, menginjak abad kesembilan belas, pembaruan pun makin dipercepat.

Sebuah *goal* yang dapat ditampilkan, bahwa mengubah tatanan negara lama hingga ke akar-akarnya menjadi sebuah tatanan baru dan lebih baik itu perlu. Adanya pihak-pihak inferior yang merasa dirugikan terhadap pihak superior harus segera ditindaklanjuti, agar kesejahteraan negara dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Berpikir radikal itu perlu, realitanya banyak khalayak sekarang yang salah paham dengan arti radikal tersebut. Padahal jika ditelaah lebih dalam lagi, radikal itu ada yang mengarah ke positif dan ada yang negatif. Pembahasan di atas mengenai Revolusi Prancis, merupakan salah satu bukti bahwa radikal itu sudah ada sejak zaman peradaban barat, dan kaum radikal melancarkan aksi-aksinya dengan visi dan misi yang benar, mereka mengeluhkan atas dasar kekejaman Rezim Lama dan wajib ditumbangkan agar tidak menyengsarakan seluruh bangsanya.

Namun, seiring berjalannya waktu makna revolusi telah keluar dari jalannya. Bertindak radikal yang mulanya berada pada jalan yang benar, kini dihancurkan pada generasi selanjutnya. Radikal kini telah dinodai oleh aksi-aksi yang keras dan ekstrim, menghancurkan visi humanis, dan memberi sumbangan bagi penghancuran masa depan tatanan yang diharapkannya.[]



**DAFTAR PUSTAKA**

Perry, Marvin. 2013. *Peradaban Barat: dari Revolusi Prancis hingga Zaman Global*. Pasaribu, Saut, penerjemah. Bantul: Kreasi Wacana.

Doyle, William. 1987. *Origins of the French Revolution*. London: Oxford University Press.

Furet, F, Richet, Denis. 1989. *Revolusi Prancis. Lembaga Indonesia Prancis*, penerjemah. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Carpentier, J, Lebrun, F. 2017. *Sejarah Prancis dari Zaman Prasejarah hingga Akhir Abad ke- 20*.

Pasuhuk, Tonny, dkk, penerjemah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kamarga, H, Siboro, H. 2012. *Isu-Isu Kontroversial dalam Sejarah Barat*. Jakarta: Bee Media.

Sugiantoro, R, B, ed. 2002. *Perang Eropa Jilid I*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani.

Giddens, Anthony. 2009. *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

# Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce atas Deformasi Istilah Radikal, dari Kemunculannya Hingga Kini



**Rusda Khoiruz**

Redaktur Jurnal Justisia Periode 2019-2020 dan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

**Abstrak**

*Kita sering mendengar istilah radikal mengarah pada hal yang negatif, dekaden dan reaksioner, bahkan orang yang dianggap radikal harus dibumi hanguskan, apalagi dalam paham keagamaan, orang yang radikal dicap sebagai teroris, pemberontak, mengancam ideologi, sesat dan lain-lain. Bagi orang nasionalis kata-kata itu menjadi momok menakutkan sehingga dimusuhi khalayak yang mengaku nasionalisnya nasionalis. Sementara itu, menelisik istilah radikal dalam KBBI artinya: secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), maju dalam berpikir atau bertindak. Secara etimologi, kata radikal berasal dari serapan bahasa Perancis radical yang berasal dari kata latin, radix/radici, yang artinya "akar". Dalam politik, istilah "radikal" mengarah pada individu, gerakan massa atau partai yang berjuang untuk merubah kondisi sosial atau sistem politik sampai dasarnya (akar) atau keseluruhan. Praktis, deformasi tersebut dibiarkan lumrah menjadi suguhan politis oleh mereka yang memiliki relasi kuasa. Kata yang secara leksikal mengandung makna positif, tiba-tiba berubah menjadi kata terlarang yang mengancam agama, nusa dan bangsa. Padahal, semangat "radikalisme" pernah menjadi salah*

*satu katalisator kemerdekaan republik ini, dan anehnya, ramai-ramai orang sekarang berlomba memberangus apa yang disebut dengan "radikalisme".*

**Keyword:** Radikal, Deformasi, Representament, Objek, Interpretant

**Pendahuluan**

Kata "radikal" kembali muncul, jika semula kata "radikal" kemunculannya bebarengan dengan semangat mengubah kondisi yang timpang serta mengiringi perjuangan hak, kesetaraan, keadilan dan pembebasan yang mana itu semua menjadi semangat pokok yang mengilhami perjuangan "radikal", tapi tidak dengan kemunculannya di era kiwari ini, kata ini semacam menjadi momok menakutkan yang siap disematkan kepada siapapun yang tidak sejalan atau sepaham dengan otoritas kekuasaan, bahkan kata "radikal" saat ini menjadi kata persatuan hampir semua elemen birokrasi pemerintahan, mulai dari kementrian sampai tingkat kedaerahan untuk berperang total dengannya. Konon, katanya seorang menteri Agama pun yang baru saja dilantik, berasal dari jajaran purnawirawan jenderal Angkatan Darat untuk memberangus apa yang disebut "radikalisme". Semula kata ini menghendaki perubahan secara "mendasar" sampai ke "akar" malah dibelotkan tafsirannya ke arah konotasi bernada negatif, kata "radikal" saat ini dimaknai sebagai ancaman yang erat hubungannya dengan terorisme. Bayangkan, jauh dari makna "akar", "dasar", "prinsip" dan "fundamental", tetapi lebih dikenal sebagai "teror".

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna dari berbagai hal yang ada di sekitarnya. Karena itu, manusia dapat disebut sebagai homo signans (cf. Danesi dan Perron 40-39 :1999). Anak kecil yang sudah mulai bisa berinteraksi dengan dunia luar di luar dirinya, apabila dia normal, maka ia dapat dengan caranya sendiri memaknai apa yang terjadi di sekitarnya, contoh sederhananya, apabila ia mendengar suara seseorang maka ia pun akan memberikan reaksi tertentu, membuka mata atau menengok. Dalam tulisan ini, penulis berusaha menelusuri dinamika sejarah sosio-politik di mana kata "radikal" pertama kali muncul di Perancis, sedikit menyinggung di Inggris dan Amerika, kemudian yang terpenting ialah di Indonesia sendiri, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana kata "radikal" dapat memberikan makna pada waktu itu?

Melihat kenyataan sejarah saat pertama kali kemunculan kata "radikal", kemudian disandingkan dengan pemaknaannya sekarang, tentu terlihat kontradiktif dan jelas telah terjadi deformasi. "Radikal" waktu itu, mengandung makna pembebasan, kesetaraan, keadilan yang lahir dari berpikir sampai ke "akar"nya, menghendaki perubahan sampai ke dasarnya, bahkan secara keseluruhan. "Radikal" waktu itu, menjadi pelopor impian untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan menolak segala ketidakadilan dan penindasan. Namun, pemaknaan kata "radikal" saat ini jauh dari kata progresif, malahan yang ada, dimaknai berbahaya dan mengancam kehidupan agama, nusa dan bangsa. Gagal memahami sejarah sepertinya menjadi salah satu faktor deformasi

kata "radikal" di abad kiwari ini, disamping suguhan politis. Dengan kata lain, kata "radikal" menjadi fobia dan dianggap memiliki makna negatif bila dimaknai begitu saja tanpa penjelasan apa pun.

Dalam melihat fenomena deformasi makna ini, penulis akan sedikit menguraikannya menggunakan analisis Semiotik pragmatisme milik Charles Sanders Pierce (1914-1839), semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia (H Hoed, Benny 15 :2014). Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus diberi makna.

Tak bisa dipungkiri, kata "radikal" dalam kancah kehidupan sosial Indonesia mengalami pasang-surut. Mulai rentang tahun 1928-1912 yang menjadi tanda lahirnya pergerakan. Kata "radikal", pemikiran "radikal", tindakan "radikal" menjadi tonggak perjuangan, dan "radikal" mencapai Puncak marwahnya ketika Soekarno menafsirkan "radikal" menjadi: Hak Merdeka!. Namun, pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada masa pemerintahan orde baru, kata "radikal" nampaknya mulai mengalami deformasi dengan digunakan untuk mencap golongan yang tidak sejalan dengan suara pemerintah, berbahaya, bom, teror dan kawan-kawannya. Dari titik inilah kata "radikal" menjadi semacam suguhan politis dan label sosial yang menyebabkan terjadinya deformasi hingga sekarang.

Alur penulisan jurnal saya ini, akan saya bagi menjadi enam sub bagian mulai dari Radikal secara bahasa. Kedua, sejarah kemunculan kata "radikal" di Perancis. Ketiga, Radikalisme di Jawa 1928-1912. Keempat, radikalisme menjelang era kemerdekaan. Kelima, fenomena deformasi kata "radikal". Dan yang keenam, kesimpulan analisis menggunakan semiotika pragmatis milik Pierce atas deformasi kata "radikal".

**Radikal secara bahasa**

Menelusuri akar kata "radikal" akan kita ketemui secara etimologi berasal dari serapan bahasa Perancis radical yang berasal dari bahasa latin yaitu radix, makna dari kata ini ialah "akar" dan berkaitan erat dengan sebuah perubahan mendasar sistem politik maupun sosial. Menelusuri kamus Merrian Webster, makna "radikal" yaitu perilaku atau opini yang erat berhubungan dengan akar, fundamental, perubahan ekstrem, khususnya dalam pemerintahan atau politik. Selanjutnya, kamus Oxford Dictionary, mengartikan "radikal" sebagai orang yang mendukung suatu perubahan sosial ataupun politik secara menyeluruh. Kamus Cambridge, memaknai kata "radikal" yaitu mempercayai atau mengekspresikan suatu kepercayaan yang dapat menjadi spirit perubahan besar atau perubahan politik dan sosial yang ekstrem dan mendasar. Sementara jika membuka KBBI, arti kata "radikal" jauh dari konotasi mengerikan, malahan bernada progresif, yaitu menghendaki perubahan secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), maju dalam berpikir atau bertindak (Hartono, Rudi 2017).

Sejarah Kemunculan kata "radikal"

dan Dinamika Sosial Zamannya: Revolusi Perancis yang "Radikal"

Tonggak awal kemunculan kata "radikal" tertelusur ketika revolusi Perancis bergulir, ramai-ramai di antara para penentang Raja memaknai dirinya sebagai kaum "radikal". Saat itu Parlemen Perancis terbagi dua kubu: semua penentang Raja duduk di sebelah kiri, sedangkan pendukung Raja duduk di sebelah kanan. Karena semua kaum radikal duduk di sebelah kiri, maka istilah radikal biasanya mengacu pada individu, organisasi atau parta politik yang berfaham kiri (Hartono, Rudi 2017).

Keadaan nasional Perancis sedang bergejolak sebab sistem pemerintahan yang timpang di satu sisi memberi hak istimewa kepada kaum bangsawan dan agamawan, misal saja, gereja katolik Perancis memiliki keistimewaan layaknya negara dalam negara. Selama berabad-abad gereja mendata kelahiran, perkawinan, kematian dan menarik pajak atas hasil-hasil pertanian, menyensor buku-buku yang membahayakan agama dan moral (Perry, Marvin, , Saut Pasaribu :2014 14). Begitupun juga dengan kaum bangsawan yang menikmati banyak keistimewaan antara lain: pemegang posisi tertinggi di dalam pemerintahan, gereja, dan militer. Mereka dibebaskan dari sebagian besar pajak atau menggunakan pengaruh mereka agar tidak membayar pajak. Di sisi lain, para penentang terdiri dari estates (tingkatan) ke tiga yaitu para petani dan buruh perkotaan yang dimiskinkan, petani tak lagi memiliki tanah untuk digarap selain menyewa kepada orang kaya, sehingga mau tak mau sebagian besar hasil pertanian diserahkan kepada para pemberi pinjaman. Biaya hidup kaum buruh perkotaan melonjak enam puluh dua persen sedangkan upah hanya sebesar dua puluh dua persen. Rentetan penderitaan kaum marjinal inilah yang menjadi alasan tuntutan mendasar atas kesetaraan, keadilan, dan pembebasan yaitu revolusi yang berjalan ke arah yang radikal-dasar, fundamental, prinsip.

Ada yang mengatakan peristiwa Bastille menjadi penanda dimulainya revolusi Perancis dan berakhirnya sistem monarki. Akhir periode rezim lama semakin menegaskan bahwa Louis XVI sudah tidak memiliki jati diri dan kendali atas masyarakat Perancis, setelah kedua kalinya (5 Oktober 1789) massa menuntut segera disahkannya dekrit Agustus dan Deklarasi Hak-hak. Akhirnya, Louis XVI menyetujui dekrit Agustus dan Deklarasi Hak-Hak, Majelis Nasional meneruskan usaha pembaruan yang dimulai kembali pada musim panas 1789. Pembaruan-pembaruan ini yang kemudian menghancurkan rezim lama, pertama, penghapusan hak-hak istimewa khusus, kedua, pernyataan hak-hak asasi manusia, ketiga, subordinasi gereja atas negara, keempat, konstitusi untuk Perancis, kelima, pembaruan administratif dan yudisial dan, keenam, bantuan untuk bisnis. kemenangan rakyat Perancis semakin kokoh disusul ketika Louis XVI dan isterinya, Marie-Antoinette, dipenggal dengan guillotine (alat pemenggal) pada januari 1793. Penyerbuan Bastille, penciptaan republik, dan eksekusi mati Louis XVI mengukuhkan bahwa revolusi tengah melewati masa "Radikal".

Pada Juni 1793, kaum Jacobin menggantikan kaum Girondin sebagai kelompok dominan dalam parlemen Nasional. Baik Girondin maupun Jacobin berasal dari kaum Borjuis. Akan tetapi, kaum Girondin menentang campur tangan pemerintah dalam bidang bisnis, sementara kaum Jacobin mendukung pengendalian sementara oleh pemerintah untuk menangani kebutuhan-kebutuhan perang dan krisisi ekonomi. Hal inilah yang menjadikan kaum Jacobin mendapat dukungan dari para sans-cullotte (pemilik toko kecil, tukang, dan pekerja upahan) yang notabenenya berasal dari estate ketiga. Pada 2 Juni 1793, delapan puluh ribu sans-cullotte bersenjata mengelilingi parlemen dan menuntut penahanan atas delegasi Girondin, suatu aksi yang menjadi pijakan kaum Jacobin meraih kendali atas pemerintahan.

Dalam beberapa catatan sejarah negara di dunia, banyak sekali gerakan yang menyematkan kata "radikal" atas dirinya. Pada 1802, di Inggris, salah satu faksi di tubuh partai liberal menamai dirinya "kaum radikal". Mereka memperjuangkan reformasi parlemen, hak pilih dan dipilih bagi semua orang tanpa kecuali. Di Amerika Serikat, kata "radikal" muncul seiring dengan perjuangan penghapusan perbudakan dan penegakan keadilan sosial. Pasca perang sipil (1865-1861), kata "radikal" dipergunakan secara luas di Amerika. Terutama karena adanya faksi dalam Partai Republik yang menganjurkan distribusi jutaan hektar tanah untuk bekas budak (Perry, Marvin, , Saut Pasaribu 34-17 :2014).

**Radikalisme di Jawa**

Tonggak Radikalisme di Jawa memuncak rentang waktu 1928-1912 pada setiap gerakan yang memegang prinsip non-kooperatif/tidak mau bekerja sama, seperti, SI (Sarekat Islam), PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia) dan lain sebagainya (Shiraishi, Takashi :1997 65). Perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme di awal abad ke-20 inilah yang disebut dengan masa Radikal.

Dinamika sosial Hindia-Belanda (Indonesia) pada awal abad ke20- memang mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat dari program kolonial Belanda, yaitu program Politik Etis. Terutama untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia serta mempersiapkan mereka supa-ya mampu diajak bekerja sama dengan orang Eropa (Belanda) dalam memerintah negeri jajahan (T McVey, Ruth 12 :2010). Sepintas terlihat mulia, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak sekali penyelewengan wewenang oleh pegawai Belanda, sekalipun, mungkin, niat awalnya baik.

Dengan adanya Politik Etis, administrasi model Eropa mulai diterapkan besar-besaran, hingga ke daerah-daerah. Akan tetapi, manfaat kebijakan seperti perbaikan dan irigasi tidak pernah dirasakan oleh rakyat, bahkan sebaliknya, perbaikan jalan dan irigasi sama artinya dengan kenaikan pajak untuk perawatan fasilitas tersebut. Akibat yang lain dari Era etis berimbas juga pada merosotnya pengaruh dan peran tokoh tradisional yang sudah tidak mampu lagi melakukan mediasi antara penduduk desa dengan berbagai unsur gangguan dari luar (T McVey,



Ruth 14-13 :2010).

Masyarakat mulai mencari tokoh lain di luar pemimpin tradisional untuk menjadi wakil dan pemimpin mereka, dan nampaknya organisasi pergerakan seperti SI merupakan alternatif yang menjanjikan. Terbukti efektif, mulai lahirnya SI pada awal 1912 sampai 1913 pertumbuhan SI luar biasa di Jawa dengan didirikannya afdeling-afdeling (Wilayah administratif) di berbagai wilayah dengan harapan masyarakat kelas bawah beserta segala macam keluhan dan kegelisahan mereka mendapatkan solusi. Sebagian besar orang Belanda di Indonesia menjadi lebih waspada kepada gerakan SI dan benar, SI menjadi gerakan Radikal non-kooperatif sehingga pada 30 Juni 1913 oleh Idenburg tidak diizinkan membangun organisasi terpusat, tetapi kelompok lokal SI tetap boleh melakukan kegiatan secara otonom (T McVey, Ruth 18 :2010). Dengan begitu, intervensi pemerintah kolonial kepada SI afdeling (cabang/wilayah administratif) setempat akan lebih mudah dijinakkan dan diintervensi setiap gerakan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk pada 1918, yang menjadikan partai-partai yang ada di Indonesia menjadi lebih kritis dan radikal terhadap pemerintah kolonial. Terlihat masalah ini diangkat dalam perdebatan pertama ke Volksraad (nama yang diberikan Parlemen Belanda kepada Dewan Kolonial) yang dibentuk dan disetujui oleh parelemen Belanda pada Desember 1916, lembaga ini bertugas sebagai badan penasihat tanpa kekuasaan legislatif, interpelasi maupun penyelidikan parlementer (Shiraishi, Takashi 128-127 :1997). Bagi beberapa partai yang tergabung yaitu SI, Budi Utomo, Insulinede ini menjadi lembaga menarik terlepas dari kekurangannya karena Volksraad menyediakan arena bagi mereka untuk angkat bicara dengan kekebalan parlementer. Maka, mereka membentuk sebuah faksi yang dinamai Radicale Concentratie untuk merumuskan suatu rencana aksi (T McVey, Ruth 45-44 :2010).

Di dalam volksraad, beberapa partai yang tergabung dalam faksi Radicaale Contentratie menyerukan "persamaan hak", "persaudaraan", dan "persaudaraan". Insulinde adalah sebuah partai politik bentukan Eduard Douwes Dekker atau lebih dikenal Multatuli dan Tjipto Mangunkusumo. (Dahlan, Muhidin M 2019).

Pemerintah kolonial nampaknya semakin keras terhadap gerakan yang dihelat SI hingga akhirnya pada November 1918 Gubernur Jenderal Van Limburg Sitrum mengambil keputusan konsolidasi yang dikenal "janji November" yang isinya kurang lebih reformasi. Namun, lagi-lagi seluruh janji akhirnya diabaikan dan hanya menjadi buaian semata, ternyata mulai saat itu pemerintah kolonial mengambil langkah-langkah serius dalam menghadapi kaum revolusioner

(T McVey, Ruth 47-45 :2010).

Ketika Gubernur jenderal Van Limburg Sitrum mengarahkan Hindia menuju otonomi dengan janji 'Novembernya', dan membimbing pergerakan ke jalur yang evolusioner dan parlementer, inisiatif untuk mengarahkan pergerakan menuju aksi langsung melalui jalur revolusioner dan radikal datang dari ISDV, khususnya dari Sneevliet dan Semaoen. ISDV adalah kelompok yang nantinya mempengaruhi sebagian aktivis SI untuk berkolaborasi mendirikan partai baru bernama PKI (Shiraishi, Takashi 132 :1997).

**Radikalisme pada Era Menjelang Kemerdekaan**

Tak bisa dipungkiri, kata "radikal" dalam kancah kehidupan sosial Indonesia mengalami pasang-surut. Kata "radikal" mendapat marwahnya ketika Sukarno mendengungkan: hak merdeka! (Soekarno dalam Mencapai Indonesia Merdeka 82 :2019). Melalui gerakan Noncooperation, Sukarno menjelaskan "bahwa antara sana dan sini adalah suatu pertentangan kebutuhan yang tak dapat ditutup-tutupi atau di-"jembatani". Noncooperation kita adalah berisi aktiviteit dan radikalisme, radikalisme semangat, radikalisme pikiran, radikalisme sepak terjang, radikalisme dalam segala sikap lahir dan batin. Radikalisme inilah yang menuntut sikap militant. Kita tidak boleh bersikap diam-diam saja jangan menyerang, kita harus keluar dari rumah-rumah kita, keluar menjalankan penyerangan atas segala pusat-pusat musuh! (Soekarno dalam Nasionalisme, Islamisme, Marxisme 95-94 :2015).



Kutipan penjelasan Sukarno yang jika kita bayangkan Sukarno sedang berapi-api berorasi di atas mimbar tentang radikal itu, jelas maksud penjelasannya mengarah pada perubahan mendasar, sampai ke akar, bahkan dalam bentuk makna paling fundamental terbebas sepenuhnya dari. Di medan pergerakan, radikal dimaknai oleh para punggawa PKI sebagai pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan kolonial.

Sejak saat itu, gerakan "radikal" menjadi cikal bakal bagi kemerdekaan Indonesia. Meski kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945 namun gerakan "radikal" tak pernah surut hingga menjelang tahun -50 an. Terjadi banyak sekali perubahan dalam tatanan sistem pemerintahan dari pemerintahan kolonial menuju demokrasi terpimpinnya Sukarno. Banyak pula tokoh pergerakan "radikal" yang lahir di era ini, salah satunya yang dikenal sebagai bapak Republik yaitu Tan Malaka.

**Deformasi Kata "Radikal" Pada Masa Orde Baru Sampai Kini**

Konotasi makna positif kata "radikal" porak poranda seketika saat Orde militerisme Harto sepanjang tahun 1980an1990-an, mencap para aktivis Islam yang menggelar perlawanan terhadap asas tunggal pancasila sebagai "kelompok radikal". Kata ini makin

bejat maknanya ketika pemerintahan sedunia menabuh genderang perang melawan terorisme yang juga dicap sebagai "kelompok radikal" berjubah Islam (Dahlan, Muhidin M 2019). Bayangkan, sinonim kata "radikal" adalah "teror", bukan "akar", "primer", "dasar", "pokok".

Kronologis kemunculan label sosial kata "radikal" yang dipakai untuk mencap golongan yang tidak setuju dengan asas tunggal pancasila, adalah sejarah Nahdlatul Ulama' (NU) yang pada tahun 1978 melawan Pancasila sebagai asas tunggal dalam sidang Umum MPR saat membahas Garis Besar Haluam Negara (GBHN), karena dua hal: mensejajarkan aliran kepercayaan dengan agama-agama resmi, dan program indoktrinasi Pancasila sebagai ideologi negara, yang berujung pada asas tunggal Pancasila.

KH Bisri Syansuri, tokoh penting NU, memandangnya sebagai ancaman terhadap status Islam ssbagai agama dan memprotesnya dengan keras. Alih-alih ketidaksenangan kalangan Muslim terhadap Pancasila itu sendiri, penolakan ini terjadi lantaran konsep relativisme agama, bahwa semua agama yang diakui sama benarnya dan sejajar dengan aliran kepercayaan yang terkandung dalam program indoktrinasi tersebut. Pangkal persoalannya adalah, Organisasi dan partai politik mau tidak mau harus menerima UU Nomor 1985/3, atau bubar.

Tahun 1980an, KH As'ad Syamsul Arifin, yang juga tokoh penting NU, memulai proses mediasi antara Islam dengan Pancasila. Lalu, pada Muktamar NU ke27- di Situbondo




tahun 1984, NU resmi menyatakan mendukung Pancasila sebagai prinsip dasar kebangsaan (Matanasi, Petrik 2017). Akhirnya penerimaan UU Nomor 1985/3 berjalan mulus tanpa kendala berarti terhadap NU.

Akan tetapi, nada positif Kata "radikal" yang disuguhkan kepada golongan millenial terasa sudah kadung seperti bau bangkai, basi. Betapa tidak? Mulai dari tayangan media mainstream di gadget maupun saluran Televisi Nasional justeru menghadirkan aksi-aksi terorisme, pemberontakan, makar sebagai reperentasi "radikalisme". Bahkan, baru-baru ini, katanya tujuan dipilihnya seorang menteri Agama yang berasal dari jajaran Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat untuk menggebuk apa yang disebut "radikalisme", untuk berperang melawan kelompok "radikal". Selanjutnya, apa yang tersisa dari kata "radikal"?

### Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce atas Deformasi Istilah Radikal

Proses semiotik pragmatis ini melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah aspek representament atau tanda (pertama melalui pancaindera), tahap kedua mengaitkan representament secara

spontan dengan pengalaman (objek) dalam kognisi manusia, dan ketiga menafsirkan objek sesuai dengan keinginannya, tahap ketiga ini disebut interpretant (H Hoed, Benny :2014 9-8). Jadi, semiosis adalah proses pembentukan tanda yang bertolak dari representament yang secara spontan berkaitan dengan object dalam kognisi manusia dan kemudian diberi penafsiran tertentu oleh manusia yang bersangkutan sebagai interpretant. Bagi Pierce, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu.

Kata "radikal" ditempatkan sebagai representament atau tanda, kemudian bersinggungan langsung dengan objek (pengalaman kognisi manusia) tentangnya (radikal), selanjutnya ditafsirkan sebagai interprentant.

Berdasarkan hubungan antara representament dan objeknya (kognisi manusia), ada tiga jenis tanda, yakni ikon, indeks, dan simbol (W Hasna dan R Indriyana 107-106 :2019). Dalam konteks ini, pemaknaan kata "radikal" erat kaitannya dengan tanda model ke tiga yaitu simbol, alasannya karena jenis simbol berada langsung di tengah-tengah kehidupan sosial dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Misalkan saja kata "radikal" muncul di tengah-tengah perjuangan rakyat Perancis dan mampu mengilhami semangat perubahan saat revolusi Perancis bergulir, atau ketika suatu kelompok, partai dan lainnya yang menghendaki perubahan sampai ke akar-akar sistem sosial maupun politik.

Kategorisasi tanda, pada kata "radikal", kini dipahami sebagai sistem simbolik, dan pertama-tama, yang harus dipahami adalah bahwa sistem simbolik didasari oleh konvensi sosial yang berarti harus dilihat dalam konteks kebudayaan suatu masyarakat atau subkultur suatu komunitas. Ini berarti bahwa sistem simbolik adalah suatu konsep sosial dan budaya. Kedua, sistem simbolik mengacu pada berbagai jenis representament, baik itu realitas fisik, kognitif, maupun virtual (H Hoed, Benny 11 :2014). Namun, terjadi kegamangan saat tanda berubah menjadi sistem simbolik, secara tidak sadar, tanda seperti ini telah menjelma menjadi sebuah label sosial.

Meski, Pierce memperkenalkan proses semiosis secara berlanjut bahkan sampai tak terhingga, ketika proses semiosis mencapai tahap interpretant, sebagai contoh, kata "radikal" yang sudah mencapai tahap interprentant bisa saja menjadi representament dan dikaitkan secara spontan dengan pengalaman objek (kognisi manusia) yang baru dan kemudian muncul interprentant baru. Nah, interpretant baru inilah yang menjelma menjadi semacam "label sosial" yang pemaknaannya berhenti. Padahal, Pierce menghendaki proses semiosis tersebut tak terhingga. Proses semiotik sosial seperti ini otomatis mengikis nalar kritis dan sama sekali tidak mendidik (H Hoed, Benny :2014 197). Parahnya, "lebel sosial" (kata "radikal") dipakai untuk mencap suatu golongan yang dianggap berbahaya, mengancam, tidak pro kebijakan pemerintah. Mulai dari sinilah, kata "radikal" menjadi suguhan politis untuk melanggengkan status quo kekuasaan pemerintah.

**Kesimpulan**

Pierce menghendaki proses semiosis tak berhingga, dalam meneropong makna kata "radikal" secara leksikal, interpretant kata "radikal" jika melihat konteks sejarah di masa lampau erat kaitannya dengan perjuangan perubahan secara mendasar, sampai ke akar, fundamental, pokok, asas dan lainnya. Maka seharusnya, dengan segera kata "radikal" di abad millenial ini menjelma sebagai simbol perjuangan yang baru dan kontekstual sejalan dengan semangat zamannya. Akan tetapi, yang terjadi adalah deformasi yang mengerikan. Apabila kata "radikal" disematkan kepada suatu aliran paham keagamaan maka bayang-bayang yang muncul adalah "teror", "bom bunuh diri", "sesat". Apabila kata "radikal" dikaitkan dengan konteks sosial dan kenegaraan maka gambaran yang muncul ialah "pemberontakan", "makar", "kudeta".

Menggunakan trianitas teori Semiotik Pierce yaitu, representament, objek (kognisi manusia), dan inter-pretant untuk menganalisa fenomena deformasi kata "radikal". Nampaknya, yang telah berubah dari pemaknaan awal kata "radikal" terjadi akibat pengalaman, objek (kognisi manusia) yang telah berubah sama sekali sehingga mengakibatkan proses semiosis yang bermula dari simbol berhenti pada label sosial dan tidak terjadi lagi proses semiosis alias berhenti. Kata "radikal" malah sekedar menjadi label sosial.

Anehnya, ketika makna kata "radikal" sudah terdeformasi. Pemikiran kritis (fundamental, pokok, akar dan lain-lain) atas keadaan realitas sosial yang timpang ikut terseret ke gelanggang pemaknaan kata "radikal" yang sudah terlanjur dianggap berbahaya. Akhirnya, tak tersisa satu tempat pun untuk pemikiran kritis karena pemikiran kritis telah sekalian dianggap sesuatu yang "berbahaya" dan "radikal". Dugaan penulis, deformasi kata "radikal" terjadi akibat pengalaman objek (kognisi manusia) yang telah berubah. Yang pertama, akibat dari kegagapan memahami sejarah dan kedua, suguhan politis yang mengkambinghitamkan kata "radikal" sebagai sesuatu yang dianggap berbahaya.[]



## DAFTAR PUSTAKA

SHIRAISHI, Takashi. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1926-1912. Diterjemahkan oleh Hilmar Farid*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997. Cet, Pertama.

T McVey, Ruth. *Kemunculan Komunisme Indonesia. Diterjemahkan oleh Tim Komunitas Bambu*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010. Cet, Pertama.

H Hoed, Benny. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2014. Ed, ketiga.

W, Hasna dan R, Indriyana. *Postmodernisme*. Yogyakarta: Sociality, 2019.

Soekarno. *Nasionalisme Islamisme Marxisme*. Bandung: 2015. Cet, pertama.

Soekarno. *Mencapai Indonesia Merdeka*. Bandung: 2019. Cet, Keempat.

Perry, Marvin. *Peradaban Barat dari Revolusi Perancis Hingga Zaman Global Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu*. Bantul: Kreasi Wacama 2014. Cet, Kedua.

Dahlan, Muhidin M. 2019. *Ramai-ramai Ngawur Menggunakan Kata Radikal*. (https://tirto.id/ramai-ramai-ngawur-menggunakan-kata-radikal-ek6S. Diakses 17 Desember 08:45 ,2019).

Hartono, Rudi. 2017. *Menyelamatkan Istilah "Radikal"*. (http://www.berdikarionline.com/menyelamatkan-istilah-radikal/#comments. Diakses 17 Desember 13:54 ,2019).

Matanasi, Petrik. 2017. *Siapa Menolak Pancasila Sebagai Asas Tunggal?*. (https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/siapa-menolak-pancasila-sebagai-asas-tunggal-coki. Diakses 21 Desember 10,35 ,2019).

# Analisis mengenai Gerakan Radikalisme dalam Islam Persfektif Historiografi dan Dinamika Kajian Politik Islam



**Abdullah faiz**

Redaktur Jurnal Justisia Periode 2019-2020 dan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Abstrak

Ketika kita mau membuka lembaran sejarah Islam di masa klasik, akan ditemukan fakta bahwa radikalisme sebagai suatu gerakan bukanlah fenomena baru dalam dunia Islam modern. Islam memiliki sejarah panjang mengenai gerakan ini. Sebutlah sebuah aliran keagamaan dalam Islam, yaitu Khawarij adalah contoh aliran yang paling terkenal dengan fahamnya yang radikal, dan tidak kenal kompromi. Hal ini dibuktikan dengan anggapan mereka terhadap para sahabat yang terlibat dalam perang shifin dan perang jamal dianggap kafir dan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya, di antaranya yaitu melakukan pembunuhan terhadap sahabat Nabi pasca Perjanjian atau Tahkim (arbitrase) yang dianggap telah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Mereka selalu berpegang pada ayat 44 surat Al Maidah tentang konsekuensi tahkim tanpa hukum dari allah. Oleh karena itu, dalam usaha mengisi kurangnya kajian histografi teologi Islam kontemporer dalam kaitannya dengan penggunaan kata radikalisme, tulisan ini dibuat untuk melakukan analisis "bagaimana hubungan pemerintahan masa Islam klasik antara faham Khawarij dengan gerakan islamisasi yang kerap disebut dengan radikalisme Islam sekarang ini". berangkat dari kata radikalisme yang

selalu menjadi kambing hitam setiap ada kerusuhan pada sebuah Negara ,di sini penulis akan mencoba mencari jejak genealogi radikalisme pada masa islam klasik.

**Pendahuluan**

Salah satu fenomena yang cukup menarik saat ini adalah penggunaan semangat, motif dan symbol-simbol agama, khususnya islam. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji karena selalu menjadi senjata dalam panggung perpolitikan sehingga menjadi sentiment agama (Islamic card) untuk kepentingan politik itu, isu agama juga menyentuh bagian yang sangat sensitif menyangkut soal aqidah politik berdasarkan garis keagamaan ini mengingatkan orang kembali pada teori politik aliran yang bersumber dari dikotomisasi seorang muslim yang kolot dan muslim yang moderat dan mencakup yang beragama lain . Dikotomi ini dalam praktiknya tidak hanya menyangkut soal sejauh mana kepatuhan dan ketaatan seorang muslim menjalankan Islam tetapi juga berlaku dalam bidang politik. Sehingga sentiment agama dalam dunia perpolitikan sangatlah tajam dan selalu dimanfaatkan baik itu untuk hal positif atau negatif .

Setelah persaingan politik telah usai bukan berarti sentiment keagamaan dan politik aliran telah selesai, yang terjadi selanjutnya yaitu kondisi keamanan negara semakin tidak terjamin. Sentiment keagamaan mulai merangkak dengan doktrin keagamaan yang diyakini lebih benar dan sangat sesuai dengan Al Qura'an dan Al Hadist namun orientasinya lebih mengarah pada pergantian ideologi negara. Dan akhirnya terjadi berbagai teror yang mengarah pada aparatur negara, hingga media menyorot hal ini sebagai gerakan terorisme dari kelompok kelompok radikal. Di samping itu pemerintah menganggap setiap yang melawan Negara adalah kelompok radikal. Sekarang ini di Indonesia sedang ramai orang mengutuk "radikalisme". Sehingga menjadi isu nasional dan ini menunjukan bahwa kata radikalisme sedang mengalami deformasi luar biasa. Maknanya sudah bergeser jauh dari makna positif dan progresif menjadi sangat negatif dan reaksioner . Sejak kapan istilah radikalisme muncul dalam panggung politik sebagai kekecewaan atas penguasa yang sedang berkuasa, dan apa sebenarnya radikalisme itu, sehingga dituduh punya relasi kuat dengan istilah terosime.

Dalam sejarah Islam Klasik, kata radikalisme belum pernah ditemukan. Namun secara gerakan dan pemikiran sering sekali kita jumpai di perbagai kajian keislaman. Istilah radikalisme diproduksi oleh Barat, namun gejala dan perilaku kekerasan itu dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah umat Islam. Fenomena radikalisme dalam Islam sebenarnya diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan

kolonialisme dan imperialime ke dunia Islam. Terpecahnya dunia Islam ke dalam berbagai negara bangsa, serta proyek modernisasi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru berhaluan Barat, mengakibatkan umat Islam merasakan terkikisnya ikatan agama dan moral yang selama ini mereka pegang teguh[1]. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan radikal dalam Islam yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai sebuah penyelesaian dalam menghadapi kekalutan hidup. Tidak hanya sampai di situ, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap sekular dan menyimpang dari ajaran agama yang murni. Selain Islam fundamentalisme, ada berbagai istilah yang digunakan oleh pengamat dan sarjana politik untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena radikalisme dalam Islam, baik dari masa klasik maupun hingga masa modern tentang kebangkitan Islam di dunia.

**Memahami Makna Radikalisme**

Pada awalnya makna asli dari radikal tidak mempunyai konotasi yang negative. Karena kata itu lebih sering dikaitkan dengan makna perubahan. Perubahan yang radikal adalah perubahan yang sangat besar. Dalam kamus bahasa inggris Collin cobuild, English Dictionary For Advanced Learners (2001) orang radikal didefinisikan sebagai *"the radical people believe that there should be a great change and try to bring about these changes"* (Orang radikal percaya bahwa




perubahan besar harus dilakukan dan mereka mencoba melakukan perubahan itu). Dengan definisi ini maka pada awalnya kata radikal menjadi semacam senjata untuk melakukan perubahan terhadap situasi yang kurang baik dan hanya dengan perubahan yang besar situasi itu bisa diperbaiki maka gerakan gerakan sosial seperti revolusi yang ingin menggulingkan kekuasaan yang tirani, demontrasi mahasiswa yang mengusung gagasan perubahan yang besar biasanya dilabeli dengan gerakan radikal.

Definisi yang murni ini hanya melihat subtansi dari radikal (isme). Definisi dari perspektif subtantif sepertinya tidak menyinggung cara dalam melakukan perubahan, apakah bisa dilakukan dengan cara yang baik (damai) ataupun cara yang kurang baik misalnya kekerasan seperti konflik, pertumpahan darah dan terorisme. Sekarang ini terkesan bahwa pengertian radikalisme lebih ditekankan kepada penggunaan cara-cara kekerasan, tidak ada kompromi, tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Pengertian ini dapat dirujuk misalnya kepada definisi yang

1. Penjelasan yang komprehensif mengenai basis sosial psikologis revivalisme Islam di Timur Tengah, dapat dilihat dalam R. Hrair Dikmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in Arab World (New York: Syracuse University Press, 1985), hlm. 36 -25. Lihat anzar Abdullah "Radikalisme dalam Islam persefektif sejarah"dalam jurnal addin vol 2016 10

disampaikan oleh Horace M. Kallen dan Harun yahya. Kallen mendefinisikan radikalisme dalam tiga karakteristik. Pertama, paham yang merespons dalam bentuk evaluasi, penolakan atau penentangan gagasan, lembaga atau nilai dari pemerintahan. Kedua, paham yang bertujuan melakukan perubahan secara mendasar atas apa yang ditolak atau yang dievaluasi agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ketiga, memerlukan kepercayaan tinggi dari para aktornya terhadap ideologi atau program yang ditawarkan. Harun Yahya melihat radikalisme sebagai sebuah ideologi yang mendorong perubahan mendasar dan serentak tanpa kompromi dan menggunakan cara-cara kekerasan

Dengan definisi ini istilah radikalisme ditempelkan kepada gerakan-gerakan yang ingin melakukan perubahan besar tetapi cara-cara yang dilakukan biasanya tanpa kompromi ,tidak sejalan dengan norma dan hukum yang berlaku dan disertai dengan cara-cara kekerasan seperti revolusi demonstrasi masa,konflik dan juga terorisme, secara sepesifik para teroris disebut melakukan aksi radikal karena misi mereka melakukan perubahan social, politik ekonomi secara sistematik dengan menggunakan cara-cara kekerasan seperti provokasi, menyebarkan kebencian menjelek-jelekan atau mengkafirkan pihak di luar kelompoknya tidak ada kompromi dengan hukum maupun budaya yang berlaku[2].

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi, dalam karyanya memberikan makna istilah radikalisme dengan *al-Tatarruf ad-Din*. Atau bahasa lugasnya adalah untuk mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi *tarf* atau pinggir/ tepinya saja. Jadi jauh dari substansi ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah. Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak sewajarnya. Lanjut al-Qaradhawi, posisi praktik agama seperti ini setidaknya mengandung tiga kelemahan, yaitu: pertama, tidak disukai oleh tabiat kewajaran mansia; kedua, tidak bisa berumur panjang; dan yang ketiga, ialah sangat rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain[3]. Apa makna dari implikasi cara beragama seperti ini, ialah bahwa dalam praktik pengalaman beragama terdapat orang-orang berperilaku ekstrim, sehingga melebihi kewajaran yang semestinya.

## Muculnya Kata dan Gerakan "Radikalisme" di masa Islam Klasik

Akar Sejarah terjadinya perilaku kekerasan dalam Islam, pada umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik, yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa. Namun, gerakan radikalisme yang sistematis

2. Yunanto sri islam moderat vs islam radikal dinamika politik islam kontemporer 2018 yogyakarta media presindo.
3. Lihat Yusuf al-Qardhawi, al-Sahwah al-Islamiyyah: B>aina al-Juhad wa al-Tatarruf (Kairo: Bank at-Taqwa, 2001), hlm. 29-23.



dan terorganisir baru dimulai setelah terjadinya Perang Shiffin di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya sebuah gerakan teologis radikal yang disebut dengan "Khawarij". Dengan kata lain, golongan "Khawarij" memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halaman untuk "berhijrah" dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya[4]. Entah di masa sekarang ini, wujud Kelompok khawarij masih ada atau tidak, yang pasti gerakan dan pemikiranya sampai sekarang masih ada namun istilah yang dipakai berbeda dengan kata Khawarij.

Dalam konteks teologi Islam, Khawarij berpedoman kepada kelompok atau aliran kalam yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari barisannya, karena ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) ataupun perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan kekuasaan (khilafah). Menurut kelompok Khawarij, keputusan yang diambil Ali adalah sikap yang salah dan hanya menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi inilah yang melatarbelakangi sebagian barisan tentara Ali keluar meninggalkan barisannya[5].

Sepanjang sejarah perjalanan Islam, banyak ditemukan fenomena pemasungan teks-teks keagamaan (al-Qur'an) untuk kepentingan politik yang ujung-ujungnya memicu tindakan radikalisme agama. Sebagai contoh peristiwa mihnah yang terjadi pada masa pemerintah khalifah al-Ma'mun (833-813 H). Dalam peristiwa tersebut, terjadi pemaksaan pendapat oleh golongan Mu'tazilah, sebuah golongan dalam Islam yang mengaku dirinya sebagai kelompok yang rasionalis. Tokoh-tokoh Islam dan pemuka masyarakat yang tidak sependapat dengan sekte tersebut dipenjarakan, disiksa dan bahkan ada yang dihukum mati. Ironisnya, fenomena radikalisme agama semacam ini tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang[6].

Gerakan kaum Khawarij[7] yang muncul pada masa akhir pemerintahan Ali ibn Abi Thalib dengan prinsip-prinsip radikal dan ekstrim dapat dilihat

4. Achmad Gholib, Teologi dalam Perspektif Islam (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 47.
5. Lihat Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 113-112.
6. Lihat Junaidi Abdillah RADIKALISME AGAMA: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an dalam Jurnal IAIN Raden Intan Lampung Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.
7, Khawarij secara terminology artinya kelompok yang menyatakan diri mereka keluar dari pasukan ali setelah terjadi keputusan majelis tahkim yang kontrofersial dan bahkan pada akhirnya mereka menjadi musuh yang sangat militan dan mereka juga menentang muawiyah .kelompok ini kemudian menjadi sekte tersendiri selain sekte sekte islam yang lain .jumlah mereka pada saat keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib diperkirakan sebanyak 12.000 personel yang di pimpin oleh seorang yang bernama Hurques bin Zuhair sebagai panglimanya dan mereka bermarkas di harura suatu wilayah di Kuffah.
8. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1999), h. 113-112.

sebagai gerakan fundamentalisme klasik dalam sejarah Islam. Langkah radikal mereka diabsahkan dengan semboyan *laa hukma illa lillah* (tidak ada hukum kecuali milik Allah) dan *laa hakama illa Allah* (tidak ada hakim selain Allah) yang dielaborasi berdasar Q.S. al-Ma'idah: 44 yang berbunyi: *wa man lam yahkum bimaa anzala Allahu fa ulaika hum al-kafirun* (siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir).

Karena alasan demikian, kelompok Khawarij tidak mau tunduk kepada Ali dan Mu'awiyah[8]. Dari rekaman sejarah tersebut bisa dilihat bahwa fundamentalisme Islam lebih banyak menekankan — atau setidaknya — membenarkan penggunaan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut sebagai manifestasi dari keimanan. Dari peristiwa semacam itulah, kemudian ada sebagian orang yang membayangkan adanya sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya– meskipun salah sekalipun.

Pandangan teologis kaum Khawarij tersebut dianggap sebagai gerakan radikal pertama kali yang teratur dan sistematis. Hal ini tidak hanya sebatas keyakinan dan pemahaman saja melainkan diikuti oleh sikap politik yang ekstrim dan radikal pula. Mereka berpandangan bahwa orang orang yang tidak sependapat dengan mereka dianggap musyrik dan boleh dibunuh.

Masa kekhalifahan Ali selama lima tahun kurang tiga bulan lebih, banyak dipenuhi peristiwa peristiwa tragis yang terjadi sepanjang pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, munculnya kelompok kelompok Islam yang menentang pemerintahannya kemudian dianggap sebagai pemberontak dan menjadi golongan Radikal fundamentalis, dalam upaya menghadapi penentangnya, Ali melakukan langkah-langkah strategis dalam memajukan negara di beberapa provinsi yang kondisinya relatif lebih kondusif. Kondisi carut marut ini dapat ditengarai karena besarnya pengaruh orang-orang penentang terhadap pemerintah Ali[9], sehingga pemerintahan Ali dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang dihadapkan pada betapa sulitnya mengatasi konflik politik internal.

Munculnya gerakan radikalisme di tubuh kaum khawarij adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya sempalan kelompok ini adalah pasukan setia Ali, mereka membela Ali dalam menumpas gerakan Aisyah dan gerakan Muawiyah, tetapi kemudian mereka menarik dukungan melakukan pemberontakan terhadap Ali. Bahkan setelah keluar dari barisan Ali mereka telah merencanakan target pembunuhan terhadap beberapa sahabat Nabi diantaranya yaitu Abu Musa Al Asyari, Ali bin Abi Thalib, Amer bin Ash dan Muawiyah bin Abi Sufyan . Keempat Sahabat ini adalah target utama dalam misi pembunuhan.

9. Syed Husein Muhammad Jafri ,Moralitas politik islam :belajar dari perilaku politik ali bin abi thalib (Jakarta pustaka Zahra ,2003)hlm 17.

Sebab mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam keputusan Majelis Tahkim (arbritrase) ketika diberlakukan genjatan senjata dalam perang dahsyat antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah di Shiffin. Rencana pembunuhan orang-orang Khawarij hanya berhasil dilakukan kepada Ali saja, sementara yang lainya selamat dari rencana pembunuhan tersebut[10].

Radikalisme Khawarij sebagai pemberontak telah terbukti dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawananya terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman Dinasti Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Oleh karena itu, mereka memilih Imam sendiri dan membentuk pemerintahan kaum Khawarij[11]. Radikalisme gerakan ini bukan saja pada aspek pemahaman, tetapi juga pada aspek tindakan. Khawarij memahami ajaran Islam secara harfiyah, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi; dan mereka merasa wajib melaksanakannya tanpa perlu penafsiran macam-macam. Alamat kafir dan musyrik dialamatkan oleh kaum Khawarij kepada siapa saja orang yang tidak sepaham dengan golongannya, bahkan terdapat orang yang sepaham tetapi tidak mau hijrah ke daerah mereka. Bahkan mereka menyebutnya sebagai "*dar al-harb*" sehingga dapat dibunuh. Berhubung dengan perbuatan yang sangat kejam itu, Azyumardi Azra menyebut aksi kaum Khawarij sebagai *isti'rad*, yaitu eksekusi keagamaan, bukan sebuah jihad[12].

**Radikalisme Antara Konflik Politik dan Doktrin Agama**

Pada dasarnya semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup dalam kedamaian keselamatan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan agama muncul, baik secara teologis atau sosiologis adalah guna menyantuni dan menyelamatkan anak manusia, menunjukkan jalan kedamaian dan keselamatan, mengajarkan kasih sayang di antara sesama manusia makhluk lain dan lingkungan hidup menyucikan diri dari perbuatan buruk, tercela atau merusak dan sebagainya.

Dalam sejarah panjang dengan mempersempit pembahasan dalam Islam, dari segi sejarah penyiaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan ajaran atau bukti yang menunjukan pembenaran penggunaan kekerasan. Jika ajaran dan konsep Islam dipahami secara menyeluruh dan sebagai kesatuan niscayalah sia-sia mencari keabsahan atas tindakan radikal dan kekerasan. Ini tentu berbeda, jika ajaran Islam dibahas secara sepotong-sepotong atau sebagian tidak terlepas dari konteks ajaran keseluruhanya ajaran yang dilakukan sementara oleh kaum muslimiin. Dalam penyebaran Islam, Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam sejarah, tidak pernah pula

10. Sirojudin Aly, Pemikiran politik islam ; Sejarah ,praktik dan gagasan (RajaGrafindo persada 2018 Depok)
11. Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. H<arun Nasution (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 124.
12. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 141.




melakukan tindakan dan aksi radikal. Baik dalam pengertian menghendaki pemaksaan dan perubahan nilai secara revolusioner, maupun dalam pengertian menggunakan kekerasan dan pemaksaan agar orang kafir dapat memeluk agama Islam. Kalaupun Nabi mengangkat senjata, itu tak lain merupakan upaya pembelaan diri.

Sampai sini perlu adanya kajian mendalam mengenai kemunculan radikalisme, antara doktrinisasi ajaran agama atau muncul dari konflik politik. Bila menyimak sejarah politik masa khilafah Ali Bin Abi Thalib, radikalisme adalah prodak asli dari kekacauan politik sebab ketika tingkat kepentingan politik semakin tinggi, tatkala itu pulalah tercipta konflik politik yang kian tajam pula diantara ummat Islam[13]

Konflik yang berbuntut dengan terbunuhnya Utsman bin Affan dan dilantiknya Ali sebagai khalifah kemudian dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tajam dari peperangan ke peperangan lain, yang mana musuhnya justeru saudara sendiri. Proses politik yang semacam ini kemudian yang memunculkan gerakan radikalisme dari rakyat yang kemudian dikenal dengan gerakan radikalisme. Hal ini tidak hanya dipandang secara teologis namun juga politis. Dalam keyakinanya tentu saja menganggap Ali juga Muawiyah telah melanggar dan keluar dari Islam oleh karena itu halal darahnya untuk dibunuh . Masalah ini berawal dari Politik kekuasaan yang kemudian menyangkut masalah teologi, karena mereka dalam menghakimi pembunuhan Ali dan Sahabat lainnya itu dengan membawa ayat Qur'an.

Pandangan teologis keras ini diikuti dengan sikap politis yang ekstrim dan radikal. Pada tingkat yang amat ekstrim dan radikal sebagai kaum pemberontak yang mengatasnamakan Khawarij sampai pada pendapat, orang yang tidak sependapat dengan mereka adalah musyrik, dan kalangan Khawarij sendiri yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga termasuk musyrik dan yang berada di arena itu wajib dibunuh. Hanya daerah mereka sendiri yang termasuk *Daar Islam*. Sedangkan kawasan muslim yang lain adalah Daar *Kufri (harbi)* yang harus diperangi dan dihancurkan dalam praktiknya jika aliran radikal semacam ini bertemu dengan orang Islam lain yang tidak termasuk golonganya tak ampun lagi mereka membunuh[14].

**Kemunduran dan Radikalisme pra-modern**

Kemunculan politik radikal kaum khawarij menimbulkan reaksi dan respons dari kalangan Islam lainya, muncullah aliran teologi lainya seperti Murjiah, Syiah, Mu'tazilah dan

13. Uraian ringkas konfrehensif dalam bahasa indonesia tentang hubungan konflik politik dan kemunculan berbagai faham teologi karya klasik Harun Nasution ,teologi islam Jakarta 1973
14. Azyumardi azra ,Reformasi politik islam ,radikalisme ,khilafatisme dan demokrasi Jakarta prenada media 2016.hal 199-189.




lainnya sehingga antara satu sama lain saling serang karena perbedaan pendapat. Disintegrasi politik dan konflik pemahaman keagamaan ini tak bisa lain, kecuali mengantarkan ummat Islam ke arah disintegrasi sosial politik, sehingga dengan mudah dijarah bangsa Mongol. Meski para penjarah ini kemudian memeluk agama Islam,tetapi keadaan umat Islam sudah semakin parah, sehingga amat sulit membangkitkan kembali kejayaan Islam seperti masa sebelumnya. Bahkan sebaliknya, perlahan tapi pasti ummat Islam kian terjerumus ke dalam kemunduran dan keterbelakangan.

Dalam situasi kemunduran itulah kemudian barat hadir di berbagai wilayah umat Islam, baik secara militer, kebudayaan, politik, teknologi, ekonomi dan sebagainya. Di sinilah bermulanya marginalisasi umat Islam sehingga menjadi terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan, kemiskinan dalam bidang ekonomi tertingal dalam pendidikan, tertindas dalam bidang politik dan sebagainya. Dengan demikian kompleksitas persoalanya kian rumit yang mengakibatkan situasi serba buruk. Tak heran kalau di kalangan umat Islam muncul istilah pemurnian agama.

Umat Islam dalam menghadapi kemunduran dan penetrasi barat yang kian mencekam itu adalah pemurnian agama. menurut pandangan aliran ini, ketakutan kaum muslimin pada kekuatan non muslim adalah karena mereka telah menelantarkan ajaran Islam yang sebenarnya karena mereka menerima azab dari tuhan sebab itu diperlukan perombakan drastis pandangan dan sikap keberagaman umat Islam itu sendiri. Di sini kemudian muncul gerakan pemurnian agama yang kadang-kadang tidak segan melakukan aksi radikalisme terhadap ummat Islam itu sendiri seperti terlihat dalam penomena gerakan Wahabiyah di Arab Saudi dan kelompok neo Wahabiyah di India. Akan tetapi ada juga yang melakukan pemurnian secara damai seperti gerakan kaum Salaf di Mesir, dan Afrika Utara[15].

Setelah Perang Dunia II usai, menghasilkan kemerdekaan bagi banyak wilayah Islam dengan menjadi Negara bangsa. Di sini Masyarakat Islam sendiri mulai berkesempatan membangun kembali kekuatan politik dan ekonomi mereka. Meski demikian, perbenturan dengan Barat ataupun perbedaan di antara sesama kalangan ummat Islam sendiri belum selesai dengan terwujudnya kemerdekaan. Perbedaan itu, dalam beberapa kasus bahkan kian mengikat, khususnya ketika gagasan modernisasi dan liberalisasi semakin ditekankan penguasa dan kelompok elite lainnya sebagai satu-satunya alternatif untuk memajukan masyarakat Islam. Sebagian muslim menolak mentah-

15. Ibid hal 192

mentah modernisasi yang dipandang tak lain daripada westernisasi sebagian lagi menerimanya bulat bulat, dan ada pula yang berusaha memadukanya dengan ajaran Islam dan sistem kultural setempat. Perbedaan semacam ini tak jarang menimbulkan konflik amat tajam. Sehingga pada gilirannya memunculkan gerakan radikal di kalangan tertentu. Situasi semacam ini tidak jarang dimanfaatkan para penguasa untuk kepentingan status quo politik dan ekonomi mereka.

Sementara itu, negara negara baru Islam ini tak urung kemudian harus terperangkap ke dalam pertarungan politik dan ekonomi. Hal ini menimbulkan kekerasan struktural yang ada dalam dinamika dan dialektika kekuatan global ini akhirnya mengejawentahkan dirinya dalam proses dan dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara Islam. Ini muncul, misalnya, dalam bentuk represi politik, perampasan hak-hak asasi, pelenyapan hak berbeda pendapat, yang kemudian secara konstan menimbulkan situasi semakin tidak stabil di negara Islam bersangkutan. Kenyataan ini mendorong terjadinya radikalisme di dalam gerakan Islam semacam Ikhwanul Muslimin. Sehingga memunculkan Kelompok *al Tanhzim al Jihad* yang membunuh Presiden Anwar Sadat di Mesir, gerakan fedeyran di Afrika Utara, berbagai organisasi rahasia di Turki dan gerakan Ayatollah Homaini di Iran yang berhasil menumbangkan rezim tirani Syah Iran, dan semacam gerakan Mahdi pimpinan Juhaiman Muhammad Otteibi yang menyerbu Masjid Al Haram di Mekkah Akhir tahun 1979[16].

Pemurnian agama ini adalah langkah titik terang bagi mereka untuk menjemput kembali kejayaan yang sudah hilang, gerakan ini adalah upaya positif yang memperjuangkan perubahan sosial secara total atau gerakan politik secara mendasar namun keputusannya serasa tidak ada kompromi hingga disebut dengan langkah pemaksaan dan kekerasan seperti gerakan Wahabiyah yang tadi disinggung, gerakan Wahabiyah yang berkembang di Saudi Arabia telah mengkafirkan satu setengah miliyar ummat Islam *Al Asyariyah* dan *Al Maturidiyah* sebagaimana disebutkan dalam kitab yang berjudul *At Tauhid* karya ibn Khuzaimah, ia mengatakan *"al Asyariyah dan al Maturidiyah"* adalah murid murid al Jahmiyyah dan Mu'tazilah serta titisan golongan Mu'athilah (yang berarti menurut mereka telah kafir semua). Doktrin mereka bahwa golongan Asy'ariyah kafir, juga disebutkan dalam kurikulum resmi pelajaran *"at Tauhid"* tingkat Aliyyah kelas I karya Shalih Al Fauzan terbitan kementrian dan pendidikan Kerajaan Arab Saudi tahun 1424 H[17].

Contoh lebih kongkret betapa dinamika kekerasan struktural pada tingkat global sangat mempengaruhi situasi sosial politik di kawasan Islam adalah kasus Palestina. Didukung superpowers Barat, penciptaan negara Zionis Israel di kawasan Palestina dan Arab yang secara sistematis melenyapkan hak-hak sah bangsa

16. Ibid 194-193
17. Fathi al mishri Radikalisme sekte wahabiyyah mengurai sejarah dan pemikiran wahabi, (Tanggerang puetaka Asyari 2011)halm 29-28

Palestina, meimbulkan dinamika politik dan kekerasan yang tak kunjung berakhir. Munculnya gerakan radikal di lingkungan PLO yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan atau terror, tak bisa lain kecuali dipahami dalam kerangka struktur global ini.

Oleh karena itu, selama struktural global yang pincang itu terus bertahan, sulit diharapkan lenyapnya gerakan radikal yang membawa-bawa semangat dan nafas agama. Bahkan gerakan radikal yang merupakan realitas dalam masyarakat mana pun dan dapat membawa-bawa nama agama mana pun terus menjadi faktor di masa datang selama struktur yang ada tetap merangsang terkristalisasi gerakan semacam ini.

**Kesimpulan**

Radikalisme adalah faham atau lebih tepat sebagai opini perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrim khususnya dalam politik/pemerintahan. Secara garis besar diartikan sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial yang menyeluruh. Gerakannya terkenal kolot dan tanpa kompromi, Menurut Azyumardi azra hal ini berasal dari kekecewaan dalam segala kebijakan pemerintah yang menyeleweng. Dalam sejarah Islam gerakan radikalisme pertama kali muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib berkuasa. Gerakan ini yang kemudian dikenal dengan kaum Khawarij. Kelompok ini dengan terang-terangan menolak dan keluar dari barisan Ali karena tidak setuju dengan kebijakan Tahkim dalam pemerintahannya. Pendapat ekstrim bahwa perang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tahkim manusia. Tetapi putusan hanya datang dari Allah swt dengan cara kembali kepada hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan tidak hanya berhenti di situ. Kelompok ini menjadi aliran teologi besar dan memiliki aturan tersendiri sehingga setiap orang yang tidak sepaham denganya dianggap kafir dan halal darahnya. Kemunculan kata radikalisme digunakan sebagai nama bagi kelompok yang memberontak pemerintahan Ali. Sedangkan dari segi akarnya jelas kelompok ini lahir dari konflik politik.[]



**DAFTAR PUSTAKA**

Penjelasan yang komprehensif mengenai basis sosial psikologis revivalisme Islam di Timur Tengah, dapat dilihat dalam R. Hrair Dikmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in Arab World (New York: Syracuse University Press, 1985).

Lihat Anzar Abdullah "Radikalisme dalam Islam persefektif sejarah"dalam jurnal addin Vol 2016 10

Yunanto sri islam moderat vs islam radikal dinamika politik islam kontemporer 2018 yogyakarta media presindo.

Lihat Yusuf al-Qardhawi, al-Sahwah al-Islamiyyah: Baina al-Juhad wa al-Tatarruf (Kairo: Bank at-Taqwa, 2001).

Achmad Gholib, Teologi dalam Perspektif Islam (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Bandung: Mizan, 1999)

Lihat Junaidi Abdillah RADIKALISME AGAMA: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an dalam Jurnal IAIN Raden Intan Lampung Volume 8, Nomor 2, Desember 2014

Syed Husein Muhammad Jafri ,Moralitas politik islam :belajar dari perilaku politik ali bin abi thalib (Jakarta pustaka Zahra ,2003)

Sirojudin Aly, Pemikiran politik islam; Sejarah ,praktik dan gagasan (RajaGrafindo persada 2018 Depok)

Azyumardi azra, Reformasi politik islam ,radikalisme ,khilafatisme dan demokrasi Jakarta prenada media 2016.

Fathi al mishri Radikalisme sekte wahabiyyah mengurai sejarah dan pemikiran wahabi, (Tanggerang puetaka Asyari 2011)

Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution (Bandung: Mizan, 1996)

Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme (Jakarta: Paramadina, 2006)

# Konstitusionalisme dan Kebebasan Beragama di Indonesia



**Cahyono**

Mahasiswa program doctoral dengan konsentrasi studi agama dan kebangsaan di Fakultas Teologi Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon.



**Abstrak**

*Banyak dari kita menerima begitu saja gagasan bahwa hak kebebasan beragama harus dilindungi dalam politik yang bebas dan demokratis. Kebebasan beragama telah menjadi hal yang sangat berharga bagi masyarakat, setidaknya selama kebebasan individu tidak diabaikan. Konstitusi sejatinya memberikan standar yang jelas di mana sebuah bangsa dapat menilai dan mengartikulasikan norma-norma yang mungkin berpengaruh pada hati nurani publik atau bahkan penguasa. Konstitusi adalah hukum, tentu saja, tetapi hukum mungkin saja tidak diberlakukan, dan bahasa hukum harus ditafsirkan dan diterapkan pada persoalan tertentu. Ini tentu menjadi pekerjaan berat bangsa Indonesia dalam memaknai konstitusi atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia setiap orang dengan setara. Pertanyaannya apakah perlindungan dan hak istimewa atas keyakinan dan identitas agama harus diprioritaskan di atas hak individu?*

## PENGANTAR

Konteks Indonesia, sepanjang rezim pemerintahan Joko Widodo banyak peristiwa tak berkeperimanusiaan telah dipertontonkan di rebupblik ini. Sebagai contoh, di sini penulis mencatat dua peristiwa yang baru-baru ini terjadi.

Pertama, peristiwa yang mengorbankan satu keluarga di Desa Lembatangoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mereka tewas terbunuh. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (2020/11/27). Kedua, pembunuhan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati oleh Polisi, Senin (2020/12/7). Jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 menjadi saksi bisu pertikaian antara orgnaisasi masyarakat FPI dengan Polisi tersebut.

Konstitusionalisme dan kebebasan beragama, dua term yang selalu hangat diperbincangkan. Bagaimana keduanya dapat dipersepsikan dalam setiap konteks kehidupan beragama, baik pada aspek pemenuhan hak-hak individu maupun kelompok sebagai warga negara. Indonesia, hemat penulis belum bicara banyak menyoal bagaimana kebebasan (individu) ini terlindungi hak-haknya sebagai warga negara. Dalam konteks beragama, polarisasi atas mayoritas minoritas kerap kali berhadap-hadapan, lalu berpaling pada kepentingannya masing-masing. Di samping itu, kenyataan manusia-manusia Indonesia yang tidak memiliki kepercayaan illahi (non-theistic religion) lalu tidak dianggap sebagai manusia? Itu terjadi karena 'kesesatan' berpikir yang menyatakan bahwa sila pertama dalam Pancasila menjadi sumber bagi sila-sila lainnya. Asumsi ini yang hemat penulis harus ditanggapi dan dikaji secara komprehensif.

Menilik persoalan di atas maka penting kiranya kajian tentang bagaimana memaknai nasionalisme dalam tataran pemenuhan hak asasi manusia. Hemat penulis kajian ini setidaknya memerlukan dua dimensi pokok yang kuat untuk diselami. Baik secara sosiologis maupun konstitusionalisme. Bahwa Pancasila sebagia teks historis yang sakral dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak serta merta hanya dipahami sebagai barang yang dikultuskan (sekadar jadi konstitusi pijakan kepentingan bagi penguasa) saja. Pancasila laiknya kitab suci, adalah teks yang mengnadung konteks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan sila kedua sebagai teks Pancasila (dalam makna historisnya), dalam konteks jaminan kebebasan beragama di Indonesia belum banyak dikaji secara komprehensif. Bagaimana teks Pancasila ini, sebagai konstitusi tertinggi mampu menjembatani terpenuhinya jaminan (menjadi manusia) yang setara sebagai warga negara, tanpa dipertentangkan dengan penghayatan atas Ketuhanan Yang Maha Kuasa. Bagaimana nasionalisme dan hak asasi manusia ini dimaknai dalam konteks ke-Indonesia-an, dan harus sejalan. Sila kedua dalam Pancasila sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi fokus penulis dalam kajian ini.

Berbicara tentang nasionalisme, menyitir pendapatnya Ernest Gellner (1925), mengatakan bahwa nasionalisme terutama dalam dasar atau prinsip politik, berpendapat bahwa politik dan kebijakan nasional (konatitusional) harus sejalan. Karena pada dasarnya, dalam perkembangan masyarakat industri, sejarah manusia sama pentingnya dengan terbentuknya sebuah negara. Bahwa prinsip nasionalis

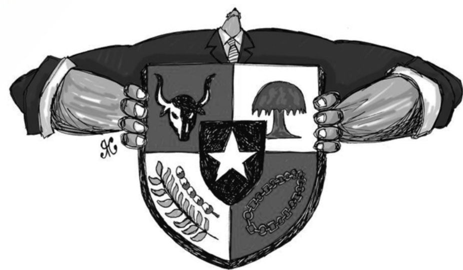
dapat didasarkan pada semangat etis, atau universalis. Sebagai ide, bagi Gellner nasionalisme secara pendekatan dapat menggunakan beberapa argumentasi positif, seperti keinginan untuk menjaga keragaman budaya, serta sistem politik internasional yang pluralistik, dan mengurangi potensi ketegangan (internal) negara-bangsa.

Konteks asal-usul masyarakat industri yang terus menjadi objek analisis ini, telah berkembang pada minat kajian sarjana dewasa ini. Maka menurut Gellner, kajian tentang nasonalisme dan kebangsaan tampaknya sangat mungkin bahwa ini akan terus relevan, (Nation and Nationalism, 1983). Konsistensi Gellner dalam kajian nasionalisme ini, ia mampu meletakkan analisisnya atas nasionalisme pada pendekatan sejarah. Gellner melihat sejarah kemanusiaan yang berpuncak pada lahirnya modernitas. Dan di sini nasionalisme adalah sebagai elemen fungsional kunci. Modernitas dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dan ekonomi, juga dengan popularisasi pendidikan, yang pada gilirannya terkait erat dengan penyatuan bahasa (kesatuan).

Namun, ketika modernisasi menyebar ke seluruh dunia, hal itu berlangsung begitu lambat, bahkan di banyak tempat, justru elit budaya lah yang mampu melawan asimilasi budaya, serta berhasil mempertahankan budaya dan bahasa mereka sendiri di tengah menguatnya arus modernisasi ini. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa nasionalisme sangat cocok dengan industrialisasi dan melayani tujuan menggantikan kekosongan ideologis yang ditinggalkan oleh lenyapnya budaya masyarakat agraris sebelumnya, yakni sistem politik dan ekonomi feodalisme yang disahkannya, (Aliyuna Pratisti, https://antimateri.com/suatu-hari-di-vodkubuzia/).

## Pancasila sebagai Realitas Indonesia dan Akar Ideologinya

Pentingnya visi spiritual berdimensi etis sebagai jangkar pertumbuhan dan perkembangan bangsa disadari penuh oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, meminjam istilah Bung Karno, adalah nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Yakni nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan; ketuhanan yang lapang dan toleran yang memberi semangat kegotong-royongan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (Yudi Latif, 2013: xxiii-xxvi).



Pancasila dan Indonesia ibarat satu mata uang dengan dua sisi. Kedua sisinya tak bisa dipisahkan. Pemisahan hanya akan mengakibatkan tidak bermaknanya Pancasila dan Indonesia itu sendiri. Pancasila, dalam hal ini, adalah realitas ideal dari suatu kondisi material yang terdiri dari berbagai suku-bangsa dengan keragaman sosial

budayanya, yang bernama Indonesia. Dari sudut pemahaman seperti ini, maka Pancasila dapat dilihat sebagai puncak konsensus manusia Indonesia itu (John A. Titaley, 45-44 :2013).

Bung Karno berkata bahwa merdeka adalah political independence, politieke onafhankelijkheid. Mengenai hal ini, Ia menjelaskan penegasan risalah yang ditulis tahun 1933. Dalam risalah berjudul Mencapai Indonesia Merdeka itu, katanya, kemerdekaan politik tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan, satu jembatan emas. "Saya katakan dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat," (St. Sularto dan D. Rini Yunarti, 86 :2010).

Proses globalisasi dewasa ini telah menciptakan budaya dan agama di tengah masyarakat yang semakin beragam. Selain itu, agama menempati tempat yang lebih menonjol di lingkup publik pada abad ke21- ini. Meningkatnya keragaman ekspresi dan identitas agama, baik tantangan maupun peluang yang berkaitan dengan isu-isu pemerintahan. Di sini, serangkaian ketegangan telah muncul antar aktor negara dan agama mengenai berbagai hal, termasuk upacara pemakaman, pendidikan agama (teologis) dan kesetaraan gender.

Banyak perdebatan ini telah berfokus hanya pada kepentingannya masing-masing, dan batasan kebebasan beragama terutama dalam situasi dimana praktik keagamaan tertentu berisiko menghambat kebebasan orang (individu) lain. Selain itu, respon yang berbeda terhadap pluralisme agama kerap bersitegang pada persoalan hubungan antara agama dan negara di masing-masing masyarakat tersebut. Karena mengubah karakteristik masyarakat yang majemuk memang diperlukan, untuk mendefinisikan kembali atas batas-batas kebebasan beragama yang tercermin dalam undang-undang, kebijakan, dan pemanfaatan ruang publik. Melihat batas-batas ini, bagaimanapun, terus diperebutkan, diperdebatkan, dan ditinjau di tingkat pemerintah lokal, nasional dan global, (Lori G. Beaman dan Steven Tomlins, 2015: ii).

Konteks perkembangan masyarakat religius, tidak ada yang religius datang dalam keadaan banyak varietas: mereka dapat mengidentifikasi diri sebagai agnostik, ateis, ateis, apatis, anti-theis, terang, freethinker, humanis, tidak dapat diabaikan, materialis, naturalis, rasionalis, skeptis, sekularis, campuran deskriptor, atau sesuatu yang lain sama sekali. Beberapa orang mungkin menemukan penggunaan istilah lain dalam mempercayai Tuhan atau Dewa untuk menjadi kontra-produktif.

Orang lain ingin mengklaim kembali ateisme dari konotasi negatif historis terkait dengan tuduhan dan membuatnya positif, dan orang lain merangkul istilah-istilah baru, seperti terang, sebagai sarana untuk menggambarkan kurangnya keyakinan agama. Yang lain mengadopsi label negatif yang telah didorong oleh tetangga agama, seperti murtad dalam Islam, masyarakat yang bid'ah. Beberapa orang bahkan ingin mempertahankan setidaknya beragam aspek budaya agama tanpa merangkul kepercayaan pada dewa monoteistik.

Sejauh ini ada kelompok-kelompok seperti ateis untuk Yesus, Institut Sekularisasi, (Lori G. Beaman dan Steven Tomlins, 1 :2015).

Berkenaan dengan ateisme, faktanya bahwa regulasi pergeseran agama sesuai dengan hukum negara berarti bahwa tidak hanya berbeda dengan tingkat budaya, tetapi juga oleh sejauh mana tingkat dan penerimaan keterlibatan publik. Karena agama terus berkembang mengikuti konteks ruang dan waktu, begitu juga ateisme, karena ateisme adalah respons atas agama yang realistis. Dengan kata lain, bagaimana agama dipahami oleh seorang ateis akan berkontribusi pada bagaimana ateisme mereka harus dipahami, dan bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat memahami agama terkait sebagai respon atas agama yang telah diatur oleh negara. Penting untuk mengingat hal ini saat memeriksa bagaimana identitas ateis mungkin berbeda, dan mungkin serupa, dalam budaya yang berbeda bahkan di antara negara-negara demokrasi liberal di dunia.

Identitas ateis juga diposisikan dalam kaitannya dengan peran historis agama kontemporer. Dalam tulisannya tentang "Freedom of and Freedom from Religion: Atheist Involvement in Legal Cases," Lori G. Beaman menyampaikan refleksinya pada berbagai klaim yang dibuat oleh seorang ateis di arena hukum, seperti keberatan terhadap doa di kota pertemuan dewan, juga pada wilayah penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Pekerjaannya sering mengeksplorasi pelaksanaan kebebasan beragama di pengadilan, tetapi ketika dia mulai




lebih memperhatikan kasus-kasus yang melibatkan ateis dia memperhatikan bahwa ateis kerap kali dikarikaturasi negatif baik di media maupun ruang sidang, dan simbol agama yang berkaitan dengan Kekristenan sering dilawan sebagai budaya berbeda dengan agama, yang berlaku melukis pelapor ateis sebagai antikultural.

Beaman mengkontekstualisasikan ateisme di arena hukum, serta bagaimana kasus hukum yang melibatkan ateis telah dilaporkan. Alasan mengapa, di mana, dan kapan ateis memutuskan untuk menjadi aktif dan terlibat dengan isu-isu negara yang berkaitan dengan agama, dari kampanye lokal hingga pengadilan, sebagian besar berasal dari bagaimana ateis memandang agama.

Ide LeDrew, seperti dikemukakan dalam tulisannya tentang "Atheism Versus Humanism: Ideological Tensions and Identity Dynamics," membahas bagaimana agama dipahami dalam lingkaran ateis, dengan menawarkan historiografi dua cabang ateisme yang dominan: ateisme ilmiah dan ateisme humanis. Dia menggambarkan ateisme ilmiah sebagai asal rasionalisme era pencerahan dan ilmu pengetahuan alam, menjelaskan bahwa ateis melihat agama dalam konteks fungsionalnya. Sedangkan, ateisme humanis, berasal

dari ilmu sosial. Ateis humanis memahami agama sebagai fenomena sosial. LeDrew mengeksplorasi bagaimana kedua cara memahami sifat agama ini telah menimbulkan ketegangan antara kelompok ateis dan humanis, terutama sehubungan dengan bagaimana mereka percaya bahwa ateisme harus disajikan sebagai keterkaitan dengan agama ketika hadir ke masalah keterlibatan publik dan aktivisme terkait agama, atau promosi ateisme di masyarakat yang lebih luas.

Baru-baru ini kita dapat melihat bagaimana komitmen agama sebagai respon atas konflik yang ditimbulkan oleh agama. Misalnya dalam konstitusi di India, juga dengan diperkenalkannya undang-undang tentang kesetaraan agama di Irlandia Utara. Jelas bahwa kesetaraan antara agama kemungkinan akan menjadi perlindungan mendasar dari setiap kesepakatan perdamaian yang mengikuti konflik agama. Kebebasan beragama kemudian diberikan sebagai bagian dari metodologi dalam menjaga perdamaian. Akibatnya, kedua belah pihak dalam setiakp konflik diberikan ruang untuk mempraktikkan agama mereka, bukan sebagai hasil dari setiap keyakinan objektif dalam nilainya, tetapi sebagai bentuk kompromi antara agama, jika tidak, faksi-faksi yang berperang.

Dalam konflik yang melibatkan kepentingan lain mungkin juga melibatkan semacam pengakuan hak yang sama. Misalnya, konflik melalui hak jalan dapat diselesaikan dengan memungkinkan kedua belah pihak sama-sama memiliki akses. Tidak ada penilaian moral yang perlu dibuat tentang nilai hak jalan. Jaminan kebebasan beragama ssebagai bagian dari kesepakatan damai sehingga tidak membawa penerimaan taktik bahwa agama bernilai. Ini hanya mewakili penerimaan oleh semua pihak yang membutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan.

Versi alternatif dari pendekatan ini, yang berlaku untuk semua negara bagian (dan bukan hanya masyarakat pasca konflik), bahwa melindungi kepentingan agama dalam masyarakat membantu untuk mencegah alienasi minoritas. Dengan demikian bukan perang saudara skala penuh yang mencegah, tetapi kerusuhan sosial yang lebih umum dalam masyarakat. Di mana minoritas mengalami diskriminasi agama, hal ini cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat.

**KONKLUSI**

Berangkat dari persoalan sosial dan pendidikan, atau dari partisipasi dalam kehidupan ekonomi negara, akan menyebabkan konflik dan kerusuhan. Dalam praktiknya individu tidak akan selalu menyerahkan kepentingan agama mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan kepentingan ini, dan beberapa penyakit sosial yang disebebkan oleh nonpartai dihindari. Pada efeknya, toleransi terhadap kepentingan agama yang berbeda dapat dipandang murni pragmatis sebagai alat yang berguna untuk mencegah disintegrasi sosial yang dapat mengikuti pengecualian minoritas. Diterapkan dalam konteks pekerjaan misalnya, kepentingan agama harus dilindungi

untuk memungkinkan minoritas agama memiliki akses ke manfaat finansial dan sosial dari pekerjaan, sehingga meningkatkan kelompok minoritas, (Lucy Vickers, 34-33 :2008).

*"In practice individuals will not always surrender their religious interests in order to participate fully in society, and so it is necessary to provide some protection for these interests so that some of the social ills caused by nonparticipation are avoided. In effect, tolerance of different religious interests can be viewed purely pragmatically as a useful tool for preventing the social disintegration that can follow the exclusion of minorities. Applied in the context of work, religious interests should be protected in order to enable religious minorities to have access to the financial and social benefits of work, thereby increasing social inclusion of minority groups."*

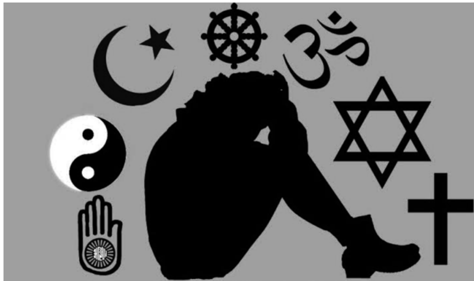
Agama sebagai pedoman hidup dan berkaitan dengan yang suci (sacred) sedari awal memang mengandung kekuatan ambivalen: yakni menakjubkan (enrapture) dan menghancurkan (annihilate). Dalam peradaban purba, memang terdapat afinitas yang kuat antara teror dan kesucian, karena fungsi gandanya: kreatif dan destruktif, pemberi kehidupan dan kematian.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalism peribadatan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritualitas, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, consciuous-inctimacy, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan profan.

**Kebebasan Beragama dan Hak Minoritas**

Banyak dari kita menerima begitu saja gagasan bahwa hak kebebasan beragama harus dilindungi dalam politik yang bebas dan demokratis. Frank B. Cross mempertanyakan apakah perlindungan dan hak istimewa atas keyakinan dan identitas agama harus diprioritaskan di atas hak individu? Kebebasan beragama telah menjadi hal yang sangat berharga bagi masyarakat, setidaknya selama kebebasan individu tidak diabaikan. Hak yang dinyatakan secara konstitusional dianggap "potongan kertas yang tidak berharga" (Keith, 113 ,2002). Bagi Keith, konstitusi sejatinya memberikan standar yang jelas di mana sebuah bangsa dapat menilai dan mengartikulasikan norma-norma yang mungkin berpengaruh pada hati nurani publik atau bahkan penguasa.

Konstitusi adalah hukum, tentu saja, tetapi hukum mungkin saja tidak diberlakukan, dan bahasa hukum harus ditafsirkan dan diterapkan pada persoalan tertentu. Mayoritas atau siapa pun yang berkuasa, mungkin hanya mengabaikan ketentuan konstitusional, sementara konstitusi di Amerika Seirkat misalnya, secara luas dianggap sebagai pemerintahan, prinsip-prinsipnya telah diterapkan sangat berbeda dari waktu ke waktu, dengan keputusan besar dibalik oleh Pengadilan Agung.



Demikian juga di Pakitastan, peradilan di bawah konstitusi bergeser dari perlindungan agresif minoritas agama ke turunnya perlindungan tersebut. Ini tentu menjadi pekerjaan berat bangsa Indonesia dalam memaknai konstitusi atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia setiap dengan setara, (FRANK B. CROSS, 106-105 :2015).

Konstitusi mungkin hanya bersifat aspirasional dalam rangka menetapkan cita-cita bangsa, dengan sedikit harapan mereka akan dipraktikkan secara adil dan setara, sama seperti agama dapat mengabdikan diri pada sistem kepercayaan, bahkan karena mereka biasanya jatuh pendek dalam praktik. Atau konstitusi mungkin diadopsi untuk tujuan simbolis, untuk meningkatkan rasa hormat bangsa di masyarakat dunia atau mungkin untuk menarik modal asing. Nilai hak pengakuan, sangat tidak pasti.

Posisi struktural ketentuannya adalah hanya untuk melindungi kepentingan beberapa posisi saja dalam melindungi hak dirinya sendiri. Seperti seorang posisi senat, atau bahkan seorang presiden misalnya. Sedangkan hak individu justru sebalikanya, tidak memiliki perlindungan struktural. Seorang penguasa otoriter mungkin merasa jauh lebih mudah untuk menganiaya pembangkang daripada menghapus institusi lain dalam tubuh pemerintah. Seperti di wilayah legislatif yang cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk dirinya sendiri daripada segelintir pembangkang.

Hak atas kebebasan beragama secara luas dianggap sebagai pencapaian mahkota dalam konteks demokrasi sekuler-liberal yang menjamin 'koeksistensi' damai populasi yang beragam secara agama. Sementara semua pemangku kebijakan seharusnya melindungi hak atas kebebasan beragama minoritas, yang dipahami sebagai penerima manfaat terbesar dalam perlindungan itu untuk mempraktikkan keyakinan mereka secara bebas tanpa takut intervensi negara atau diskriminasi sosial. Dalam kebijaksanaan konvensional dijelaskan bahwa kebebasan beragama adalah prinsip yang sah secara universal, diabadikan dalam konstitusi, piagam dan perjanjian internasional, namun implementasinya yang tepat terus digagalkan oleh kekuatan otoritas sepihak masyarakat pemerintah liberal, fundamentalis keagamaan, dan norma.

Sebagian besar konstitusi dunia mengandung beberapa ekspresi dari beberapa aspek kebebasan beragama. Amerika Serikat dan sejumlah bangsa memiliki ekspresi yang agak minimalis, dengan beberapa kata menjamin kebebasan beragama atau kebebasan hati nurani. Negara lain memiliki klausul latihan gratis yang panjang dan terperinci yang mereferensikan jenis praktik tertentu. Semua klausa memiliki beberapa perbedaan. Apapun analisis yang ketat terlebih dahulu membutuhkan karakterisasi kuantitatif ketentuan konstitusional tersebut.

Sejumlah konstitusi nasional mengkondisikan kebebasan beragama, sebuah konsep yang dikenal luas sebagai proporsionalitas. Hiebert (2005) menunjukkan bahwa ini pasti pusat dari semua masalah hak–pertanyaan tidak apakah hak dibatasi, itu adalah apakah hak tidak sehingga dibatasi. Syaratnya berarti kebebasan beragama tidak mutlak tetapi harus memenuhi syarat oleh keprihatinan nasional lainnya. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berisikan tentang kualifikasi ekspres tersebut di atas, yang memungkinkan pembatasan kebebasan untuk melayani tujuan seperti, keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, moral, atau hak dan kebebasan lain. Konstitusi Azerbaijan mengakui kebebasan beragama tetapi menetapkan bahwa kebebasan ini "tidak boleh melanggar ketertiban umum dan moral."

Konstitusi Bulgaria menyatakan bahwa kebebasan beragama "tidak akan dipraktikkan untuk merugikan keamanan nasional, ketertiban, kesehatan masyarakat dan moral, atau hak dan kebebasan yang lain." Konstitusi Venezuela memungkinkan kebebasan beragama "asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau adat istiadat yang baik." The European Convention on Human Rights diizinkan untuk pembatasan agama ketika "diresepkan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demi kepentingan keselamatan publik, untuk perlindungan masyarakat ketertiban, kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain."

Pada akhirnya, pemenuhan atas jaminan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia di atas payung konstitusi Pancasila harus ditegakkan dengan setara. Mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan. Maka sejatinya pernyataan ini tidak hanya dipahami atau dimaknai secara sempit hanya sekadar penyaratan umum bahwa segala sesuatu terjadi sebagai anugerah saja, atau karena memang di antara bangsa Indonesia ada hamba Tuhan.

Pernyataan di atas perlu dimaknai secara sosio-historis dengan menjadikannya sebagai pedoman teologis, maka dampaknya akan sangat nyata dalam konteks kehidupan keagamaan kita. Barangkali ini akan menjadi rumusan ide yang menarik untuk diperluas ke wilayah komunitas keagamaan bangsa Indonesia. Bahwa rumusan Pancasila sila kedua memiliki cakupan makna yang sangat luas dan nyata dalam kehidupan berbangsa dengan keragamannya. Menurut John Titaley, keragaman itu seperti kita bermain musik, adalah gen jatidiri yang menonjol dari keberadaan kita yang Indonesia. Seharusnya gen ini dipertahankan dan dilanjutkan.[]



**DAFTAR PUSTAKA**

Pratisti, Aliyuna, https://antimateri.com/suatu-hari-di-vodkubuzia/

Lori G. Beaman dan Steven Tomlins, *Atheist Identities - Spaces and Social Contexts* (Springer Publishing,2015).

CROSS, FRANK B., *Constitutions and Religious Freedom* (New York: Cambridge University Press, 2015).

Latif, Yudi, *Tuhan Pun Tidak Partisan* (Bandung: SYABAS BOOK, 2013).

Titaley, John A., *Religiositas Di Alinea Tiga* (Salatiga: UKSW Press, 2013).

Risalah Sidang BPUPKI (Jakarta: Widya Komputer Indonesia)

St. Sularto dan Yunarti , D. Rini, *Konflik di Balik Proklamasi* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010),

Vickers, Lucy, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* (Hart Publishing, 2008).



# Indonesia Butuh Pemimpin Radikal




Judul : Inilah Presiden Radikal

Penulis : Eko Prasetyo

Tahun Terbit : 2006

Penerbit : Resist Book

Tebal : 159 halaman

ISBN : 979-1097-21-6

Peresensi : Hasan Ainul Yakin

Mengapa Indonesia yang sudah berusia 74 tahun dihitung dari hari kemerdekaan persoalan kemiskinan belum juga tertuntaskan? Pertanyaan ini yang pertama muncul ketika membaca buku Inilah Presiden Radikal karya Eko Prasetyo. Dalam buku itu, Eko langsung menjurus pada akar masalah yang menjadi momok mengapa negara ini belum keluar dari jeratan kemiskinan walaupun telah dilakukan pergantian kepemimpinan setiap periodenya.

Akar masalah persoalan bangsa ini terletak pada penguasaan aset kekayaan oleh segelintir orang, penguasaan aset secara timpang ini mengakibatkan jurang kemiskinan semakin menganga, sehingga yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Untuk memberantas kesenjangan tersebut kita butuh keberanian negara mengecam kapitalisme dan imperalisme sebagai musuh bersama yang harus diperangi, supaya tidak ada lagi seorang atau golongan kecil yang menguasai penghidupan orang banyak. Keperluan dan kemauan rakyat banyak harus menjadi pedoman usaha dan pendapatan bersama.

Menurut Syahrir segala bidang usaha besar yang berhubungan dengan penghidupan rakyat harus berdasar konsep milik bersama dan dilakukan di bawah pengawasan rakyat, karena

itu tidak ada lagi nafsu mengeruk keuntungan selain demi kemakmuran rakyat. Milik pribadi hanya diakui dalam hal pakaian dan perkakas rumah tangga. hal 12.

Sulit terciptanya keadilan sosial apabila dalam penguasaan kekayaan berada dalam ketimpangan yang sangat lebar. Maka di sinilah kita merindukan pemimpin radikal, pemimpin yang berpihak pada mereka yang miskin dan pemimpin yang bernyali mengkritik keras dominasi kapitalisme yang bengis dan keji.

Apa yang mesti dilakukan oleh pemimpin radikal? Di dalam buku ini Eko menyasar pada kepemilikan tanah agar dirombak menjadi milik bersama yang dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh warganya. Kepemilikan tanah secara perorangan sudah barang tentu menciptakan ketidakadilan, karena hanya tuan tanah yang bisa memproduksi tanah dan kekayaan yang berada di dalamnya.

Maka dari itu, satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk meratakan ketimpangan hanya dengan cara radikal yaitu alat produksi seperti tanah, perusahaan dan aset kekayaan yang tersimpan hajat hidup orang banyak di dalamnya harus dilakukan nasionalisasi oleh negara untuk dikelola secara konsisten demi kemakmuran masyarakat.

Kebijakan tersebut sangat mungkin dilakukan asal pemimpin kita punya nyali menyita kekayaan yang dikuasai oleh kaum pemodal. Tujuannya tidak lain kecuali untuk kesejahteraan bersama bukan perorangan. Keberaniaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang lahir dari Rahim gerakan radikal. Di Indonesia, Soekarno, Hatta dan Syahrir merupakan tokoh radikal, sayangnya gagasan mereka untuk kemakmuran bangsa tidak terwarisi ke pemimpin generasi setelahnya.

Tampilnya Orde Baru merupakan babak awal persemaian semakin akrabnya antara negara dengan pemodal. Keakraban hubungan ini berjalan secara mulus hingga sekarang. Keduanya merasa saling menguntungkan satu sama lain, tapi harga yang harus dibayar mahal sekali, yaitu kemiskinan. Masyarakat miskin yang hidupnya serba dalam ketergantungan. Sebab di balik kekayaan yang dikeruk oleh pemodal terdapat hak-hak orang miskin yang mesti ditunaikan.

Persoalan seperti inilah yang juga menggelisahkan Presiden radikal seperti Fidel Castro di Kuba, Evo Moralez di Bolivia, Hugo Chavez di Venezuela dan Mahmoud Ahmed Nejad di Iran. Keempatnya dalam memimpin mempunyai kemiripan yaitu tidak segan melawan kapitalisme dan membatasi campur tangan asing yang dapat merugikan warga dan negaranya.

Keempat pemimpin radikal ini menantang kapitalisme karena mereka paham bahwa selama kekayaan di negaranya dikuasi oleh segelintir orang maka selama itu pula kekayaan akan berputar pada garis kolega alias tidak sampai menyentuh golongan rakyat miskin. Pantas saja jika keempat Preisden radikal ini mengecam kapitalisme sebagai musuh paling kejam sepanjang sejarah umat manusia, seperti dilontarkan Evo Moralez bahwa

musuh paling jahat dari umat manusia adalah kapitalisme. Hal 123.

**Belajar Pada Kuba, Bolivia, Venezuela dan Iran**

Kejahatan kepitalisme hanya bisa dilawan oleh keberanian seorang pemimpin negara yang punya pandangan progresif tentang bagaimana fungsi negara dan untuk siapa kehadiran negara. Mengkonkritkan fungsi ini penting untuk meninjau sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Apakah untuk kemakmuran rakyat atau kuasa pemodal. Kita mesti belajar pada mantan pemimpin Kuba, Fidel Castro.

Fidel Castro merupakan salah satu Presiden di dunia yang percaya bahwa kedaulatan, kemandirian dan kehormatan bangsa bukan sebuah slogan, dengan bangga ia menyebut dirinya bukan murid IMF dan itu yang membuat Kuba bisa memajukan pendidikan dan kesehatan. Hal 98. Castro menyelesaikan persoalan dasar bangsanya: pendidikan dan kesehatan dengan kebijakan sepele yaitu menggratiskan. Lewat kebijakan pendidikan gratis inilah semua masyarakat dapat menyicipi bangku pendidikan. Berbeda halnya dengan negara kita di Indonesia. Pendidikan seolah hanya diperuntukkan pada mereka yang kaya. Padahal kata Castro berkuasanya seorang pemimpin adalah memberi perhatian utama pada rakyat miskin 109. Perhatian semacam ini yang mesti pemimpin kita belajar pada Castro.

Satu hal lagi Kebijakan Castro yang sangat memukau saat ia mengeluarkan putusan besar yaitu menasionalisasi perusahaan telephon dan semua kekayaan Kuba yang berada di tangan asing diambil alih. Pada Mei 1959, Fidel Castro mengeluarkan Undang-Undang Reformasi Agraria di mana lahan-lahan yang luasnya lebih 460 hektar akan dibagi-bagi untuk koperasi petani tanpa lahan, sedangkan pemilik tanah yang luas lahannya melebihi batas tersebut masih bisa mempertahankan tanahnya asalkan dikerjakan sendiri. hal 111. Kebijakan berani seperti ini hanya dikeluarkan oleh pemimpin yang bernyali dan mengerti harus kepada siapa pemimpin itu berpihak.

Sebagaimana Fidel Castro, Presiden Bolivia Evo Moralez juga mengambil kebijakan serupa yaitu menasionalisasi atas hasil gas alam. Pada masa kepemimpinan Evo, ia mengambil alih perusahaan hasil gas alam yang dimiliki oleh perorangan untuk dikuasai oleh rakyat Bolivia. Ditegakkan dan dibentangkan spanduk besar untuk proyek nasionalisasi ini dengan kata menohok "Dinasionalisasi: miliki rakyat Bolivia". Hal 128.

Proyek nasionalisasi yang dilakukan oleh pemimpin ini karena mereka sadar bahwa pemusatan kekayaan pada segelitir orang tersimpan hak rakyat miskin di dalamnya. Lewat nasionalisasi demikian merupakan jalan berani yang tidak mengenal kompromi. Kebijakan ini tidak bisa dilakukan di Indonesia kalau pemimpin kita memilih menghamba dan bertekuk lutut di hadapan kapitalisme. Pemimpin kita beraninya menggusur perumahan rakyat miskin dengan mengatasnamakan demi kepentingan umum.

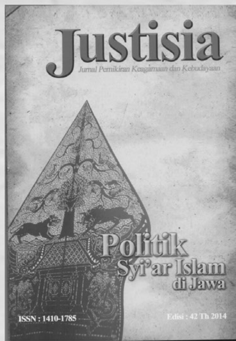
Begitupun yang dilakukan Hugo

Chaves mantan Presiden Venezuela. Hugo mereformasi Undang-Undang reformasi kepemilikan tanah. Dalam kebijakannya itu ia mengatakan bahwa pemerintah berwenang mengambil alih perusahaan real state yang luas serta tanah pertanian yang dianggap kurang produktif. Hal 132. Tanah adalah sektor penting untuk menyukseskan proyek sosial masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi mulia itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang berprinsip bahwa rakyat miskin adalah tumpuan utama yang mesti diprioritaskan.

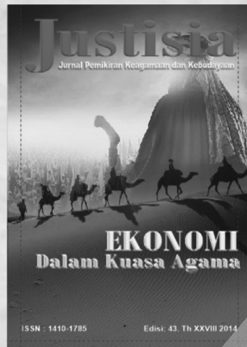
Pada halaman 145, Eko Prasetyo membandingkan kebijakan keempat pemimpin radikal yang ada di dunia dalam berbagai sektor. Pemusatan keempatnya terarah dengan jelas dan konkrit, yaitu untuk kesejahteraan rakyat miskin. Membaca kebijakan keempat pemimpin radikal ini, penulis berdo'a dan memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Indonesia segera dihadirkan sosok pemimpin yang berani melawan segala macam bentuk yang dapat membahayakan kehidupan rakyatnya.[]



# Jurnals Gallery




Jurnal Edisi 42 Th. XXVII 2014




Jurnal Edisi 43 Th. XXVIII 2014




Jurnal Edisi 44 Th. XXXI 2015



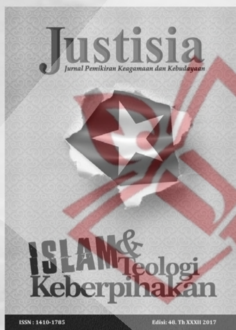

Jurnal Edisi 45 Th. XXX 2015



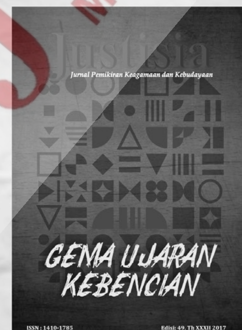

Jurnal Edisi 46 Th. XXXI 2016




Jurnal Edisi 47 Th. XXXII 2016



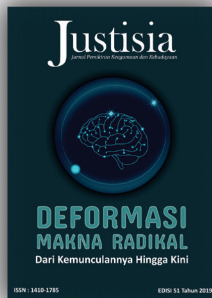

Jurnal Edisi 48 Th. XXXII 2017




Jurnal Edisi 49 Th. XXXII 2017




Jurnal Edisi 50 Th. XXIV 2019




# DEFORMASI MAKNA RADIKAL

## Dari Kemunculannya Hingga Kini

Melihat kenyataan sejarah saat pertama kali kemunculan kata "radikal", kemudian disandingkan dengan pemaknaannya sekarang, tentu terlihat kontradiktif dan jelas telah terjadi deformasi. "Radikal" waktu itu, mengandung makna pembebasan, kesetaraan, keadilan yang lahir dari berpikir sampai ke "akar"nya, menghendaki perubahan sampai ke dasarnya, bahkan secara keseluruhan. Namun, pemaknaan kata "radikal" saat ini jauh dari kata progresif, malahan yang ada, dimaknai berbahaya dan mengancam kehidupan agama, nusa dan bangsa.

Dalam melihat fenomena ini, salah satu tulisan dalam jurnal ini akan membahas deformasi makna radikal menggunakan analisis semiotik pragmatisme milik Charles Sanders Pierce (1839-1914), semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia (H Hoed, Benny 2014: 15). Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus diberi makna. Tak terkecuali kata "radikal".

Mengapa sekarang makna kata "radikal" berbeda 180° dengan waktu dulu saat kemunculannya? Apa yang sebenarnya berubah dari pemaknaan kata "radikal?" Tentu saja perubahan pemaknaan kata "radikal" ini tak bisa dilepaskan dengan konteks sosial politik. Maka, jurnal yang ada di tangan Anda saat ini berusaha untuk menjawabnya




LPM Justisia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Hamka KM.2 Ngaliyan Semarang